

No. 157 Februari - Maret 2019

# BaKTINews

www.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



KEMANDIRIAN  
HINGGA REPLIKASI  
SULSEL ITU WILAYAH!

MENANAM  
SAGU DI KEPALA

TIDAK DIPERJUALBELIKAN  
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771 979 777 057



# BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

[www.bakti.or.id](http://www.bakti.or.id)

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**  
**ZUSANNA GOSAL**  
Editor **VICTORIA NGANTUNG**  
**ITA MASITA IBNU**  
**FADHILAH MANSYUR**  
Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Praktik Cerdas & Info Buku **SUMARNI ARIANTO**  
Database & Sirkulasi **INDINA ISBACH**  
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**  
Editor Foto

## Redaksi

**Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146**  
Email [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id) atau [baktinews@bakti.or.id](mailto:baktinews@bakti.or.id) SMS BaKTI**News** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201  
Facebook [www.facebook.com/yayasanbakti](http://www.facebook.com/yayasanbakti) Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: [www.bakti.or.id](http://www.bakti.or.id) dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on [www.bakti.or.id](http://www.bakti.or.id) and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.*

## MENJADI PELANGGAN BaKTI**News**

Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email [baktinews@bakti.or.id](mailto:baktinews@bakti.or.id).

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

*To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to [baktinews@bakti.or.id](mailto:baktinews@bakti.or.id).*

*For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.*

## BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

# Daftar Isi

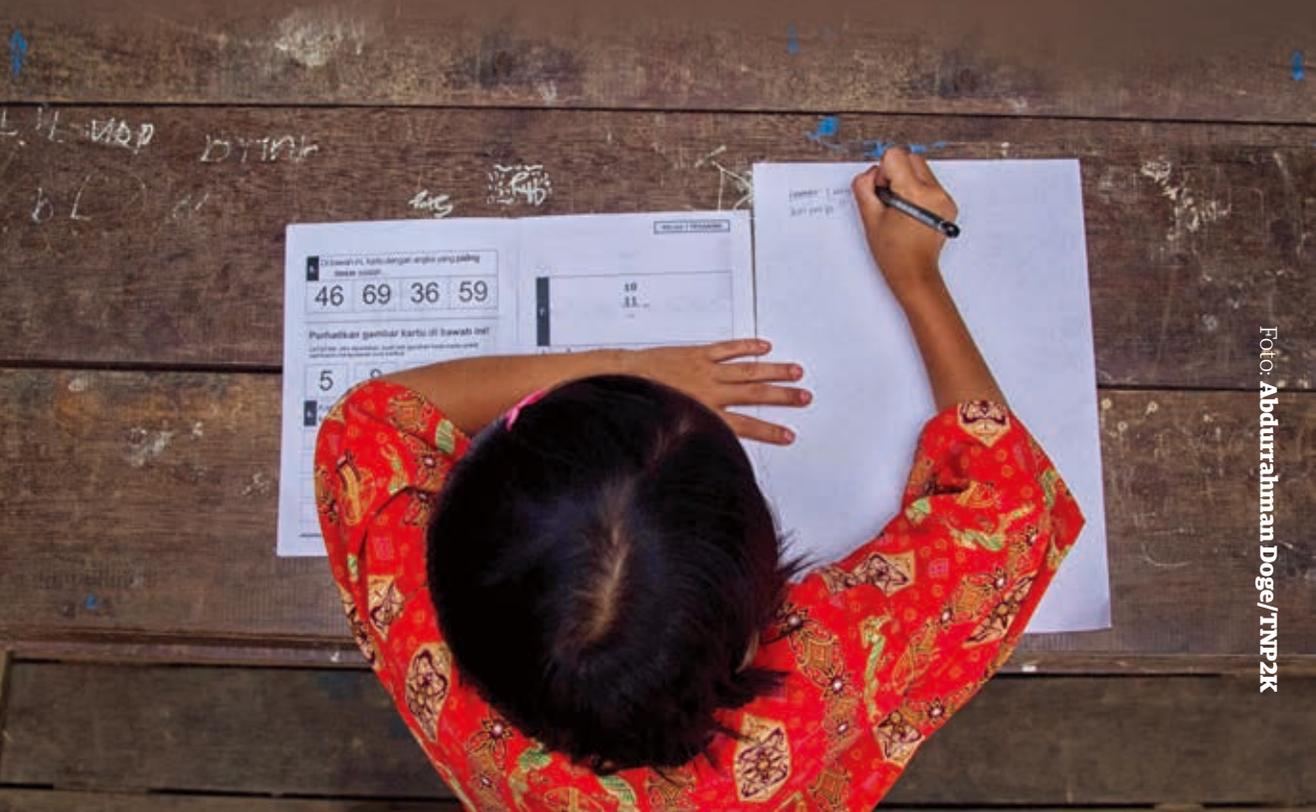
BaKTI**News**

Februari - Maret 2019

No. **157**

- 1** Kemandirian Hingga Replikasi  
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 7** Meneropong Anak Muda dari Asmat yang Belajar SAIK  
Oleh **PETRUS SUPARDI**
- 11** Sulsel itu Wilayah!  
Oleh **A. M. SALLATU**
- 14** Fagi, Pewarta BANGGA Papua  
Oleh **ABD. RAHMAN RAMLAN**
- 17** Kabupaten Sintang Berkomitmen Lanjutkan dan Perluas Program KIAT Guru  
*Sintang District is Committed to Continuing and Expanding KIAT Guru Program*  
Oleh **HERA DIANI**
- 21** Peraturan Desa untuk Kesejahteraan Perempuan  
Oleh **BAIQ TITIS YULIANTY**
- 25** Menanam Sagu di Kepala  
Oleh **WAHYUDIN OPU**
- 29** Membangun Rumah dengan Empati dan Partisipasi  
Oleh **YUDI WIJANARKO**
- 33** Pemberdayaan Masyarakat Tingkatkan Hasil Pendidikan di Daerah Sangat Tertinggal  
Oleh **HERA DIANI**
- 36** Riset: Hanya 11% Perempuan Jadi Narasumber Media di Indonesia  
Oleh **WULAN KUSUMA WARDHANI**
- 39** Update batukar.info
- 40** Kegiatan BaKTI
- 41** Info Buku

Foto Cover : **Regista**





# Kemandirian Hingga Replikasi

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

**P**ada 17 – 20 Desember 2018 bertempat di Hotel Toraja Heritage Kabupaten Toraja Utara, Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program MAMPU 2018.

Monev diikuti oleh mitra Program MAMPU-BaKTI yaitu, Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) Parepare, Yayasan Kombongan Situru (YKS) Tana Toraja, Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara (RPS) Kendari, Yayasan Arika Mahina (YAM) Ambon, Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua (PPSE-KA) Atambua, Belu, dan sub office MAMPU-BaKTI Nusa Tenggara Barat.

Monev yang dilaksanakan akhir tahun 2018 ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pencapaian sepanjang tahun, baik untuk memperbaiki kekurangan selama pelaksanaan program, maupun untuk melihat praktik-praktik terbaik yang dapat dipromosikan dan direplikasi oleh pihak lain.

Beberapa praktik baik yang terus dikembangkan dan telah direplikasi antara lain kelompok konstituen, paralegal, *shelter* warga, advokasi kebijakan, advokasi dana desa, dan reses partisipatif.

### **Kelompok Konstituen**

Kelompok Konstituen (KK) adalah organisasi tingkat komunitas yang dibentuk pada tingkat desa atau kelurahan oleh Program MAMPU BaKTI yang bertujuan mengorganisasikan komunitas untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama mengakses layanan pemerintah. KK adalah organisasi yang dibentuk untuk menghubungkan konstituen dengan wakilnya di parlemen. Organisasi ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran kritis dan memperkuat warga dalam berinteraksi dengan wakil mereka di parlemen maupun dengan pemerintah. Karena itu, KK adalah organisasi warga yang bersifat politis.

Pengurus dan anggota KK terdiri dari berbagai perwakilan dan lebih dari 70% adalah perempuan, di dalamnya termasuk perempuan miskin. Lebih dari 95% Ketua KK adalah perempuan. Melihat struktur kepengurusan dan anggota tersebut, maka KK merupakan organisasi yang mewakili warga di desa atau kelurahan untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan.

KK merupakan organisasi resmi di desa dan kelurahan, karena mendapatkan pengakuan melalui surat keputusan pengangkatan pengurus dari pemerintah desa atau kelurahan. Dengan demikian, KK tidak dimaksudkan sebagai penyaing bagi pemerintah dan organisasi desa/kelurahan yang ada, melainkan mitra strategis untuk pemenuhan hak-hak warga.

Setelah pembentukan, pengurus dan anggota KK telah memperoleh peningkatan kapasitas berupa diskusi, pelatihan, dan studi banding. Pelatihan yang diperoleh antara lain hak-hak perempuan, Hak Asasi Manusia (HAM),

pengorganisasian, dan penanganan kasus. Sedangkan materi-materi yang didiskusikan meliputi berbagai persoalan yang dialami oleh masyarakat, terutama berhubungan dengan pelayanan publik oleh negara, bagaimana melakukan advokasi untuk mengakses layanan yang ada.

Pada awal pendirian, KK membantu warga dalam pengurusan berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan pemerintah, seperti pengurusan administrasi kependudukan, beras sejahtera (Rasta) sebelumnya bernama beras miskin (Raskin), kartu BPJS, mengembalikan anak-anak yang putus sekolah, dan mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan.

Seiring dengan perkembangan, KK menjadi organisasi yang mulai diperhitungkan. KK mampu mengakses anggaran di pemerintah untuk penguatan ekonomi, mereplikasi praktik baik, bahkan pengurus dan anggota KK mulai masuk di lembaga-lembaga sosial dan lembaga pemerintah, seperti menjadi ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Beberapa di antaranya mencalonkan diri menjadi calon legislatif tahun 2019.

KK menjadi organisasi yang sangat kuat dan kritis dalam memperjuangkan hak-hak warga. Berbagai kegiatan terkait perencanaan dan penganggaran telah diikuti oleh KK, seperti Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan), dan terlibat dalam perencanaan dan penganggaran desa.

KK juga menjadi organisasi mitra anggota DPRD. Pada reses, beberapa KK dipercaya oleh anggota DPRD untuk menyiapkan reses. KK menjadi mitra kritis anggota DPRD dan pemerintah. Mereka menjadi masyarakat yang memperjuangkan hak-hak kelompoknya sebagai warga negara. Sebagai kelompok kritis, KK diharapkan menjadi warga negara yang sadar akan hak-haknya, sekaligus ikut mendorong kesadaran orang-orang di sekelilingnya untuk menjadi masyarakat yang kritis.

Beberapa KK telah menjadi kelompok yang mandiri dalam mengorganisasikan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. KK tidak hanya menghimpun dana dari anggotanya, tetapi juga mengakses anggaran dari pemerintah dan perusahaan.



Foto: Frans Gozali/Yayasan BaKTI

### Advokasi Kebijakan

Sepanjang 2015 – 2018 Program MAMPU BaKTI mendorong lahirnya sejumlah kebijakan di kabupaten/kota dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup)/Peraturan Walikota (Perwali), Surat Keputusan (SK), dan Peraturan Desa (Perdes). Sebanyak 46 kebijakan responsif gender berhasil dikontribusi Program MAMPU BaKTI yang terdiri dari 17 Perda, 16 Perbup/Perwali, 11 SK bupati, walikota, atau kepala dinas, dan 2 Perdes.

Dalam mendorong setiap kebijakan, Program MAMPU BaKTI tidak serta merta mengusulkan sebuah kebijakan kepada DPRD atau eksekutif, melainkan menempuh mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan. Ada tiga faktor yang harus dipertimbangkan untuk mendorong sebuah kebijakan, yaitu pertama, sesuai dengan kebutuhan. Setiap kebijakan yang didorong oleh mitra Yayasan BaKTI di kabupaten/kota wilayah kerja program ini yakni Tana Toraja, Parepare, Maros, Bone, Kendari, Ambon, Mataram, Lombok Timur, dan Belu benar-benar dibutuhkan oleh daerah tersebut. Karena itu, tidak harus selalu mendorong kebijakan baru, tetapi bisa saja hanya

melakukan revisi kebijakan yang sudah ada atau membuat aturan turunannya untuk implementasi aturan yang telah ada. Mendorong kebijakan baru, seperti Perda, dapat dilakukan bila aturan tersebut belum ada.

Kedua, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kebijakan yang didorong harus sesuai dengan aturan perundang-undangan, baik kebijakan yang hendak diadvokasikan maupun teknis pembuatannya. Kebijakan yang diadvokasi selalu memerhatikan aturan hukum yang lebih tinggi atau tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Sementara dalam proses pembentukan kebijakan mengikuti prosedur yang diatur dalam perundang-undangan, seperti dalam pembentukan Perda merujuk pada teknis pembentukan Perda yang diatur dalam UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Program MAMPU BaKTI juga mendorong anggota DPRD untuk berinisiatif membuat Perda. Sebagai lembaga pembentuk Perda, anggota dan DPRD tidak hanya membahas Perda yang berasal dari eksekutif, tetapi juga perlu mengusulkan Perda untuk dibahas bersama dengan eksekutif.

Ketiga, dapat diimplementasikan. Advokasi kebijakan tidak berhenti pada disahkannya suatu kebijakan, tetapi hingga tahap implementasi. Jika kebijakan yang diadvokasi adalah Perda, maka dibutuhkan sejumlah aturan yang lebih teknis untuk implementasi Perda tersebut, seperti Perbup/Perwali, SK hingga petunjuk pelaksanaan atau standar layanan yang lebih teknis semacam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Implementasi kebijakan juga harus dapat dilacak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memastikan bahwa, kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah. Pembentukan kebijakan bukan untuk menambah daftar kebijakan yang dibuat melainkan untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di daerah.

### **Advokasi Peraturan Desa**

Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan perundang-undangan di tingkat desa. Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa dan disepakati Badan Permusyawaratan Desa (angka 7 Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Sejak Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan, pemerintah dan masyarakat desa mempunyai kewenangan untuk mengelola dan mengatur desanya dengan membentuk Perdes.

Ini menjadi momentum penting bagi perlindungan perempuan dan anak di perdesaan. Namun untuk mendorong pemerintah dan masyarakat desa peduli terhadap perempuan dan anak bukanlah hal yang mudah. Masalah perempuan dan anak, apalagi di perdesaan masih kurang terakomodir dalam perencanaan, karena pihak-pihak yang mempunyai posisi di dalam pengambilan kebijakan tidak selalu mempunyai perspektif mengenai perempuan dan anak. Apalagi masalah perempuan dan anak selalu dianggap sebagai masalah domestik yang tidak memerlukan campur tangan publik apalagi negara.

Tahun 2018 di Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat dan Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan, Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur disahkan Perdes yang berhubungan dengan perlindungan

perempuan dan anak, yaitu Perdes Kembang Kerang No. 4 tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Perdes Naekasa No. 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.

Kedua Perdes tersebut didorong oleh Kelompok Konstituen (KK) yang telah mempunyai perspektif dan kepedulian terhadap perempuan dan anak. Perdes tersebut didorong berdasarkan data kasus yang diterima oleh KK, terutama terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Perdes tersebut merupakan payung hukum untuk perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa. Dengan adanya Perdes, pemerintah desa dapat melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan menangani perempuan dan anak yang menjadi korban. Perdes melahirkan mekanisme perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa, sehingga tidak korban yang tidak terlayani karena berbagai alasan.

### **Advokasi Dana Desa**

Sejak adanya Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014), pemerintah desa mendapat dana desa dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah dan masyarakat desa diberi kewenangan mengelola dana yang cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Adanya dana desa memberi peluang bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat desa. KK yang merupakan organisasi masyarakat di tingkat desa melakukan advokasi dana desa untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. KK di Desa Kembang Kerang dan Desa Naekasa telah mendorong lahirnya Perdes mengenai perempuan dan anak. Sebagai instrumen hukum di desa, Perdes memudahkan adanya alokasi anggaran untuk implementasinya.

Namun, alokasi dana desa untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak harus bergantung pada Perdes. Pasalnya, aturan penggunaan dana desa telah mempunyai petunjuk teknis yang dibuat oleh Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri.



Foto: Frans Gozali/Yayasan BaKTI

Kelompok Konstituen di Tana Toraja, Belu, Ambon, dan Lombok Timur melakukan advokasi kepada pemerintah desa untuk memastikan adanya alokasi dana desa untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain menggunakan data yang valid, pengurus dan anggota KK juga menempati posisi-posisi yang strategis di desa memungkinkan KK dapat memengaruhi alokasi dana desa untuk kepentingan perempuan dan anak.

Dana desa yang dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di antaranya berupa pelatihan keterampilan, replikasi pertanian alami, modal usaha, sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pengadaan ambulans.

#### **Paralegal dan Shelter Warga**

Di antara tujuan pembentukan Kelompok Konstituen (KK) adalah untuk memperkuat masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara, termasuk mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah. Tentu tidak mudah untuk mengakses layanan yang telah ada.

Minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah sebagai penyebab masyarakat tidak mengetahui berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah. Di sisi lain, masyarakat tidak mempunyai keberanian dan kapasitas dalam menghadapi birokrasi yang memang dibuat rumit, panjang, dan berbiaya tinggi.

Di beberapa daerah, karena luasnya wilayah menjadi faktor sulitnya masyarakat mendapat akses layanan yang lebih cepat dan mudah. Sebagai contoh, perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan tidak mudah mendapat perlindungan dari negara. Selain karena masyarakat mendiamkan karena dianggap sebagai urusan keluarga, fasilitas layanan untuk korban juga biasanya jauh sehingga tidak terjangkau oleh korban.

Melalui KK, sejak 2018 dibentuk Layanan Berbasis Komunitas (LBK) yang menjadi bagian dari KK. Sedangkan pengurus dan anggota KK dilatih mengenai penanganan kasus perempuan dan anak hingga ke tingkat menjadi paralegal dalam beberapa tahap.

Di Parepare, paralegal telah cukup maju dalam penanganan kasus-kasus di masyarakat, karena diakui oleh Pemerintah Kota Parepare.

Terobosan hukum yang dilakukan oleh Walikota Parepare menjadikan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di Parepare sangat cepat dan terkoordinasi.

Peningkatan kapasitas paralegal di Parepare juga telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga paralegal mempunyai kapasitas untuk mendampingi korban.

### **Replikasi Reses Partisipatif**

Reses Partisipatif pertama kali dimunculkan tahun 2014 dan diujicobakan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 2015. Andi Nurhanjayani, anggota DPRD Parepare dari Partai Demokrat dan Jhon Pannanganan dari Partai Golkar adalah anggota DPRD yang pertama kali melakukan reses dengan menggunakan metode Reses Partisipatif.

Pada 2015-2017 Reses Partisipatif masih terbatas dilakukan oleh anggota DPRD di wilayah kerja Program MAMPU-BaKTI, yaitu DPRD Parepare, DPRD Tana Toraja, DPRD Maros (Sulawesi Selatan), DPRD Kendari (Sulawesi Tenggara), DPRD Ambon (Maluku), DPRD Mataram, DPRD Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan DPRD Belu (Nusa Tenggara Timur). Namun, pada tahun 2018, Reses Partisipatif juga telah dilakukan oleh anggota DPRD di luar wilayah Program MAMPU-BaKTI, yaitu Y. Gustan Ganda (anggota DPRD Sleman), Mardensi (anggota DPRD Bengkulu), Verke B.J. Pomantow (DPRD Minahasa Selatan), dan Christiana Vecolina Pusung (DPRD Manado).

Reses Partisipatif adalah metode reses yang dikembangkan Program MAMPU-BaKTI yang sejak 2018 mulai diperkenalkan dan direplikasi oleh anggota DPRD di luar wilayah Program MAMPU BaKTI. Empat anggota DPRD yang telah melakukan Reses Partisipatif memberi catatan positif mengenai reses tersebut.

Kemajuan lainnya adalah pada tahun 2018, DPRD Parepare dan DPRD Maros melakukan

terobosan dengan mengadopsi Reses Partisipatif ke dalam Tata Tertib. Peraturan DPRD Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Parepare Pasal 104 menyebutkan reses anggota DPRD dilaksanakan dengan cara: (a) reses perseorangan; (b) reses tatap muka; (c) reses kelompok; atau (d) reses partisipatif. Sementara Peraturan DPRD Kabupaten Maros Nomor 01/KPTS/DPRD/X/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Maros, pada Pasal 102 ayat (5) disebutkan, reses dilakukan dalam bentuk: (a) ceramah; (b) tatap muka; (c) dialog; dan (d) reses yang bersifat partisipatif.

Terobosan yang dilakukan oleh DPRD Parepare dan DPRD Maros memudahkan anggota DPRD dapat melakukan Reses Partisipatif, tanpa perlu mempertanyakan melanggar hukum atau tidak.

### **Fokus di Tahun Terakhir**

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir Program MAMPU-BaKTI. Di tahun terakhir ini masih terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan untuk memperkuat sistem telah didukung dan dikembangkan. Untuk mendukung sistem perencanaan dan penganggaran yang responsif gender diperlukan penguatan klinik PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender).

Sementara untuk memperkuat layanan berbasis komunitas diperlukan peningkatan kapasitas paralegal dan legalisasi paralegal dan LBK di tingkat komunitas. Belajar dari Parepare dimana paralegal diakui oleh pemerintah kota, menjadikan penanganan kasus perempuan dan anak menjadi lebih terkoordinasi dan lebih cepat.

Karena tahun 2019 juga dilakukan pemilihan anggota legislatif, maka akan muncul anggota legislatif yang baru, karenanya Reses Partisipatif perlu diperkenalkan kepada anggota DPRD yang baru.

---

### **INFORMASI LEBIH LANJUT**

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program MAMPU BaKTI, dapat menghubungi [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)



# Meneropong Anak Muda dari Asmat yang Belajar SAIK

Oleh **PETRUS SUPARDI**

**C**uaca di kota Agats cerah. Jalan komposit ramai oleh pejalan kaki dan pengendara motor listrik. Di pusat kota Agats, tepatnya di depan Hotel Sang Surya Keuskupan Agats, tampak para pemuda Asmat berdiri berjejer di pagar pembatas tepi jalan komposit sambil bercerita satu sama lain. Mereka adalah kader kampung dari Distrik Akat dan Distrik Atsj yang hadir untuk mengikuti pelatihan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK). Aplikasi SAIK berbasis *website offline* dan *online*. Penggunaan aplikasi ini mewajibkan para kader kampung menyentuh komputer (laptop).



Foto: Petrus Supardi/Yayasan BaKTI



Foto: Petrus Supardi/Yayasan BaKTI

Para kader kampung yang mengikuti pelatihan SAIK merupakan pemuda kampung setempat. "Kader kampung harus orang dari kampung. Dia harus tinggal di kampung. Kader kampung dipilih oleh pemerintah kampung dalam musyawarah dengan warga kampung," tutur Implementing Manager LANDASAN, George Corputty.

Para kader kampung dari Distrik Akat dan Atsj, yang mengikuti pelatihan SAIK, pada 11-13 Desember 2018, umumnya tidak tamat SD. Ada beberapa orang tamatan SMP dan SMA. Meskipun sebagian besar kader kampung tidak tamat SD, mereka memiliki kemauan untuk belajar.

Sejak bulan April 2018, ketika Program KOMPAK - LANDASAN II masuk ke Distrik Akat dan Atsj, Koordinator Distrik (Kordis) LANDASAN Distrik Akat dan Atsj, berkoordinasi dengan kepala kampung untuk merekrut kader kampung untuk melakukan pendataan penduduk berbasis SAIK.

Pada bulan Juli 2018, Program KOMPAK - LANDASAN II menggelar pelatihan kader kampung di Distrik Atsj dan Akat. Di Distrik Atsj, pelatihan kader kampung dilaksanakan pada tanggal 17-20 Juli 2018 di SD YPPK St. Paulus Atsj. Sedangkan di Distrik Akat, tanggal 24-27 Juli 2018 di aula pastoran St. Martinus de Pores Ayam.

Pasca pelatihan kader kampung, Kordis LANDASAN memberikan pendampingan intensif kepada para kader kampung untuk melakukan sensus penduduk. Hasilnya, setiap kampung di Distrik Akat dan Distrik Atsj memiliki data penduduk manual yang siap dimasukkan ke dalam aplikasi SAIK.

Untuk menginput data para kader kampung memerlukan laptop. Sejak bulan Mei 2018, Koordinator LANDASAN Asmat, Pit Supardi telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMPK) dan pemerintahan kampung di Distrik Akat dan Atsj terkait penyediaan laptop kampung

untuk kader kampung. Hasilnya, pemerintahan kampung telah mengalokasikan anggaran pembelian laptop di Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).

Pada Selasa, 11 Desember 2018, pelatihan SAIK bagi kader kampung Distrik Akat dan Atsj dapat dilaksanakan di Hotel Sang Surya Keuskupan Agats. Spesialis Community Development (Comdev) LANDASAN, Septer Manufandu dalam arahannya pada pembukaan pelatihan SAIK mengatakan bahwa aplikasi SAIK sangat mudah dipelajari dan digunakan oleh kader kampung. Untuk dapat menggunakan SAIK kader kampung harus menciptakan kesempatan untuk berlatih terus-menerus karena berkaitan dengan keterampilan.

Sekretaris DPMPK Kabupaten Asmat, Konstantinus Kiom dalam arahannya mengucapkan terima kasih kepada pihak KOMPAK dan BaKTI yang telah membantu orang Papua yang masih tertinggal dan belum tersentuh pembangunan.

Ia mengatakan bahwa sudah 16 tahun Asmat menjadi Kabupaten. Ada banyak program dan uang yang dikucurkan untuk perubahan dan perbaikan kampung. Tetapi, orang Asmat masih hidup susah. Karena itu, ia mengajak kader kampung untuk membantu pemerintahan kampung supaya pembangunan di kampung bisa berjalan maksimal sehingga masyarakat bisa merasakan pembangunan.

Menurut Victor Duapadang, fasilitator utama pelatihan, pengucuran Dana Desa telah dilakukan selama kurang lebih 4 tahun namun sampai saat ini, belum banyak perubahan yang terjadi di kampung-kampung. Hal ini terjadi karena pembangunan kampung yang tidak berbasis data. Sehingga, data yang terpercaya merupakan hal yang signifikan yang dibutuhkan untuk pembangunan kampung.

Viktor menjelaskan bahwa data kampung membantu pemerintahan kampung untuk membuat skala prioritas pembangunan di kampung. Ketersediaan data menjadi dasar untuk menentukan arah pembangunan kampung di masa depan. Pada akhirnya, data juga menjadi dasar untuk menyusun visi dan misi kampung

sehingga kampung benar-benar membangun dirinya sesuai dengan potensi kampung. Ia juga menambahkan bahwa, proses pendataan dilakukan oleh kader kampung karena hanya orang kampung yang mengetahui persis kondisi kampungnya.

"Informasi pembangunan kampung dan informasi lain yang terkait dengan pembangunan, seperti yang tertera di dalam SAIK dapat diakses oleh warga kampung maupun semua pemangku kepentingan. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten untuk desa," tegasnya.

Pria yang sudah berkeliling Papua untuk melatih SAIK ini mengatakan bahwa dengan adanya SAIK, maka informasi dan data tersedia di kampung. Aparat kampung dan kader kampung mendapatkan keterampilan pengelolaan administrasi kampung. Selain itu, melalui SAIK, pemerintahan kampung dapat meningkatkan kualitas layanan publik dalam urusan administrasi kependudukan di tingkat kampung, sekaligus membantu proses perencanaan pembangunan kampung serta mempermudah pemuktahiran data kampung.

Usai memaparkan pentingnya data di dalam perencanaan pembangunan kampung, Viktor membimbing para kader kampung untuk mengoperasikan laptop. Ia mengajarkan mereka mengoperasikan aplikasi SAIK versi 2.0 ke laptop masing-masing lalu para kader kampung diarahkan untuk mengoperasikan berbagai fitur yang ada pada aplikasi SAIK.

Pelatihan ditutup pada hari ketiga. Sebelum penutupan, Paulus Paknomces, Ketua Kader Kampung Distrik Akat, menyampaikan harapan para kader. Ia mengatakan bahwa para kader kampung di Distrik Akat menyadari bahwa keterlibatan kader kampung dalam membantu pemerintahan kampung merupakan bagian dari usaha orang Asmat membangun kampungnya.

Sementara itu, Septer Manufandu dalam arahannya pada penutupan pelatihan SAIK mengatakan bahwa kader kampung sedang meletakkan dasar pembangunan di kampung untuk generasi masa depan Papua. "Kita harus

meletakkan dasar yang benar. Di atas dasar yang benar itulah, anak cucu kita akan berjalan. Kader kampung harus berani berpikir kritis untuk menjadi pemimpin di kampung sendiri," tuturnya. Ia juga menambahkan bahwa seluruh data yang ada di dalam SAIK harus berguna untuk proses perencanaan pembangunan di kampung, Distrik dan Kabupaten Asmat.

Pendampingan yang diberikan oleh KOMPAK LANDASAN II terhadap unit layanan kampung di Distrik Agats, Akat dan Atsj menunjukkan kemajuan signifikan. Kampung memiliki data. Kampung terlibat dalam perbaikan Sekolah Dasar (SD) dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Kader kampung mendorong pemerintahan kampung mengurus akta lahir anak, KK dan KTP. Selain itu, masyarakat kampung mulai berdiskusi tentang HIV & AIDS.

Seluruh hasil yang dicapai dalam pendampingan yang diberikan oleh LANDASAN membuktikan bahwa orang Asmat bisa membangun kampungnya secara mandiri. Mereka membutuhkan pendampingan, bukan dijadikan penonton di kampungnya. Karena itu, setiap pribadi yang terlibat dalam pembangunan kampung di Asmat harus hadir di tengah hidup orang Asmat dan memberikan ruang bagi mereka untuk merencanakan dan membangun kampungnya secara mandiri.

Setiap pribadi yang terlibat dalam pemberdayaan orang Asmat di kampung-kampung terpencil di Asmat harus percaya dan yakin bahwa orang Asmat bisa menjadi lebih baik di masa depan. Kepercayaan tersebut mesti melahirkan ruang dan kesempatan bagi orang Asmat untuk mengatur hidup dan masa depan mereka. Segala bentuk intervensi, yang bersifat mematikan daya kreasi dan inovasi orang Asmat harus dihentikan dan diganti dengan ruang bagi orang Asmat untuk mengekspresikan kemampuan mereka.

**Program KOMPAK - LANDASAN II** merupakan program pemberdayaan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan pada unit layanan kampung, sekolah dasar, Puskesmas dan HIV & AIDS yang dibiayai oleh pemerintah Australia. LANDASAN dilaksanakan oleh Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) dan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) Makassar.

LANDASAN mulai memberikan pendampingan di Asmat sejak Maret 2017. Mula-mula hanya di Distrik Agats, yang terdiri atas 12 kampung, 1 Puskesmas, dan 11 SD. Sejak Maret 2018, LANDASAN memberikan pendampingan di Distrik Akat, 11 kampung, 1 Puskesmas dan 8 SD dan Distrik Atsj terdiri atas 9 kampung, 1 Puskesmas, 7 SD. LANDASAN juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, KPA dan *stakeholder* untuk membangun komitmen pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Asmat.

Secara khusus pada unit layanan kampung di Asmat, Program KOMPAK - LANDASAN II telah memberikan Pelatihan Kader Kampung, Pelatihan Tupoksi Pemerintahan Kampung, Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran (Penyusunan RPJMK, RKPK dan APBK serta Laporan Keuangan) dan Pelatihan SAIK.

Hasil yang diperoleh adalah 10 kampung di Distrik Agats (Bis Agats, Kaye, Syuru, Asuwets, Ewer, Saw, Yepem, Per, Uwus dan Beriten) telah memiliki dokumen RPJM Kampung yang disusun secara partisipatif. Kedua kampung lainnya, Mbait dan Bouw belum memiliki RPJM Kampung yang disusun secara partisipatif karena pendataan berbasis SAIK belum selesai. Hal ini bisa terjadi karena minimnya keterlibatan pemerintahan kampung dan kader kampung dalam pendampingan yang diberikan oleh LANDASAN.

Sedangkan 11 kampung Distrik Akat dan 9 kampung di Distrik Atsj telah memiliki data penduduk berbasis SAIK. Kampung-kampung yang belum memiliki laptop, data kampung masih bersifat manual (pendataan menggunakan format SAIK). Apabila sudah ada laptop, maka para kader kampung akan segera menginput ke dalam aplikasi SAIK.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program KOMPAK-LANDASAN II, dapat menghubungi [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)

# Sulsel itu Wilayah!

Oleh **A. M. SALLATU**

**S**ajak lama istilah pembangunan daerah sudah kurang lazim digunakan, dan telah digantikan oleh pengembangan wilayah. Istilah pengembangan wilayah ini memang telah umum digunakan, hanya saja realisasinya masih belum terlihat nyata. Pengembangan wilayah dapat dikatakan sekedar istilah, tanpa esensi yang cermat dalam praktik pembangunan. Oleh karena tetap saja cara pandang dan pendekatan sektoral lebih mengungguli cara pandang dan pendekatan wilayah.

Pengembangan wilayah dalam kerangka pembangunan daerah memang hanya diungkapkan dan dinarasikan. Namun tidak menjadi jaminan bahwa mampu dipahami apalagi dikuasai mulai dari wawasan berpikinya sampai kepada perumusan perencanaan pembangunan. Mengapa? Karena memang tidak terlalu mudah merumuskan dan dipandang membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk melihat hasilnya. Berbeda dengan pembangunan sektoral yang mampu memberikan hasil nyata dalam waktu yang lebih singkat.

Ada anggapan bahwa pembangunan sektoral secara otomatis akan mampu mengembangkan wilayah, kenyataannya tidak memiliki dukungan empirik. Justru sebaliknya, pembangunan sektoral lebih banyak menciptakan kantong-kantong pertumbuhan yang lebih lanjut hanya mendorong berbagai kesenjangan. Tetap sulit dipahami dan diakui bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat yang didorong oleh pembangunan sektoral pada kenyataannya cepat mengalami kejenuhan.

Meskipun tidak sulit menemukan realitas empiriknya, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan (SulSel).

Hal yang lebih mendasar lagi, bila mencermati pembangunan Sulsel selama ini, dapat menjadi pertanyaan apakah kemajuan dan perkembangan yang dicapai sejatinya merupakan buah dari perencanaan pembangunan? Adalah naif untuk melupakan inisiatif dan peran pelaku pembangunan, bahkan para petani kecil sekalipun di daerah ini. Peran pemerintah selaku pengampu kebijakan pembangunan hanya lebih banyak dalam bentuk pembangunan infrastruktur fisik, menarik investasi, dan sejumlah proyek mercusuar lainnya. Tetapi efek sampingnya cukup memprihatinkan adalah terjadinya ketimpangan wilayah, disamping ketimpangan-ketimpangan lainnya. Karena itu, proses perumusan dan dokumen perencanaan pembangunan masih perlu tetap dicermati saat ini. Masihkah potret di atas akan dilanjutkan periode jangka menengah ke depan?



Foto: Yusuf Ahmad/Nayasan BaKTI

Nampaknya belum ada gambaran yang jelas bahwa perencanaan pembangunan Sulsel telah mengedepankan pengembangan wilayah. Justru pembangunan sektoral masih mendominasi dalam praktik pembangunan. Walaupun sebenarnya unsur-unsur pengembangan wilayah telah menjadi pembahasan, katakalah melalui visi-misi mulai dari skala provinsi dan skala kabupaten/kota. Menempatkan wawasan dan cara pandang pengembangan wilayah perlu diletakkan di depan, lalu kemudian mengidentifikasi dukungan pembangunan sektoral untuk mewujudkannya. Oleh karena betapapun, pengembangan wilayah mampu berhasil tanpa dukungan pembangunan sektoral. Tetapi sebaliknya, pembangunan sektoral secara otomatis mampu mengembangkan wilayah.

Wujud kinerja pengembangan wilayah, dalam bahasa perencanaan, perlu diletakkan lebih awal sebagai sebuah kinerja kumulatif yang mampu dicapai. Untuk konteks Sulsel misalnya, akan seperti apa wujud wilayah Sulsel pada akhir jangka menengah ke depan? Dalam kerangka pembangunan sebelumnya, dengan ungkapan yang meskipun belum terukur secara konkrit, telah dinyatakan bahwa Sulsel akan menjadi 'pilar utama pembangunan nasional...'. Itulah pilihan Sulsel, dengan segala konsekuensinya dimana nasional sangat mengedepankan upaya pertumbuhan ekonomi, dan sebagai pilar utama harus menanggung pembangunan yang tidak merata dan kesenjangan serta ketimpangan multi dimensi.

Konsekuensi logis di atas, apakah akan diteruskan atau justru ingin dibenahi pada kurun waktu jangka menengah ke depan? Inilah pilihan yang tersedia bagi pengembangan wilayah ke depan. Sepatutnya para pengampu kebijakan pembangunan dapat cermat merumuskannya dalam dokumen perencanaan yang tidak lama lagi akan dihasilkan.

Memang patut dicermati, oleh karena sejauh ini kinerja pembangunan Sulsel masih lebih banyak terlihat dalam bentuk penjumlahan, belum lagi dalam bentuk suatu kesatuan yang utuh. Hasil-hasil pembangunan sektoral masih lebih nampak sebagai sebuah penjumlahan, masih belum terkait antara satu dengan yang lainnya sebagai suatu kesatuan, baik infrastruktur

maupun sektor-sektor ekonomi. Demikian pula kinerja pembangunan kabupaten dan kota, masih jauh dari wawasan pembangunan yang terintegrasi. Padahal inilah peran utama pembangunan pada skala provinsi, mengaitkan antar sektor maupun antar daerah di wilayahnya. Dengan demikian perencanaan pembangunan provinsi sejatinya dituntut untuk mampu mengintegrasikan dan menjadi perekat melalui pengembangan wilayah.

Patut disadari bahwa di tanah air, lebih dari dua dekade yang lalu, Sulsel merupakan provinsi yang lebih awal memiliki wawasan wilayah dalam pembangunannya. Wawasan wilayah misalnya, yang mendasari pengembangan komoditas unggulan di Sulsel. Sayangnya, beberapa provinsi lain yang justru lebih berhasil dalam menerapkan wawasan kewilayahan tersebut. Suka atau tidak suka, betapa pun menggembirakannya nilai komoditas unggulan yang dihasilkan di Sulsel dewasa ini, masih tetap dalam makna penjumlahan, sehingga tidak perlu mengherankan bila transformasi sektor-sektor ekonomi tidak mampu berkembang secara ideal. Para pelaku ekonomi di Sulsel selama ini masih harus berjuang sendiri-sendiri, karena tidak dibarengi oleh kebijakan yang menaunginya. Setuju atau tidak setuju, inilah kinerja buruk perencanaan pembangunan yang ada selama ini.

Hal yang sama dengan kinerja pembangunan kabupaten dan kota selama ini, yang harus lebih banyak berinisiatif dan berimprovivasi sendiri-sendiri, karena payung pengembangan wilayah tidak tersedia pada skala provinsi. Otonomi daerah kabupaten dan kota menjadi kambing hitam, yang dilukiskan tampil sebagai perilaku dalam motivasi pembangunannya masing-masing. Padahal dilupakan bahwa seperangkat kebijakan yang berhasil adalah justru yang mampu mengubah perilaku. Seperti itulah seperangkat kebijakan pembangunan pada skala provinsi sepatutnya mampu dihadirkan. Mewujudkan pameo dalam perencanaan bahwa *planning is nothing but policy*, perencanaan itu sejatinya adalah kebijakan.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Koordinator Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JIKTI) dan dapat dihubungi melalui email [madjid76@gmail.com](mailto:madjid76@gmail.com)



Fagi sedang mewawancarai Kepala Distrik Suator, Asmat  
Foto : Abd. Rahman Ramlan/Yayasan BaKTI

# Fagi, Pewarta BANGGA Papua

Oleh  
**ABD. RAHMAN RAMLAN**

**S**osoknya kecil, ramping dan bersemangat. Dengan sebuah kamera di tangannya, dia gesit berlari ke sana ke mari mencari momen yang tepat untuk mengabadikan aktivitas Bupati Asmat, ketika meninjau kegiatan pembayaran dana BANGGA Papua di Distrik Suator hari itu. Sesekali, matanya mencari-cari, lalu dia mendekati beberapa orang

dan mewawancarai mereka. Sejumlah tokoh setempat menjadi narasumbernya.

Tulisan Moh. Fagi Difinubun, atau biasa dipanggil Fagi, melaporkan tentang rencana Pemkab Asmat menghadirkan swalayan BANGGA Papua di distrik. “Pemkab Asmat akan bangun swalayan BANGGA Papua di sejumlah distrik,” demikian judul tulisan Fagi, yang kemudian dimuat di salah satu media *online* Papua pada 28 Januari.

Fagi menulis, dalam menghadirkan swalayan ini, Pemkab Asmat akan bekerjasama dengan pedagang lokal agar mereka ikut menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dengan harga terjangkau. Dengan cara ini, penerima manfaat program BANGGA Papua bisa membelanjakan dana yang disediakan untuk membeli kebutuhan gizi anak-anak dari warung atau toko terdekat.

Ini bukan tulisannya yang pertama tentang BANGGA Papua. Sebelumnya, Fagi juga menulis berita berjudul “Program BANGGA Papua Semangati Warga Asmat Lengkapi Persyaratan



Fagi (berkacamata), menyampaikan tulisannya dalam Pelatihan Menulis Berita “Journalism for Non-Journalist” di Agats, yang difasilitasi oleh Yayasan BaKTI.  
Foto : Abd. Rahman Ramlan/Yayasan BaKTI

Administrasi.” Tulisan ini diterbitkan di media *online* Papua, 11 Januari 2019. Setelahnya, Fagi juga menuliskan artikel “Swalayan BANGGA Papua Suator Asmat Diresmikan”, 24 Januari 2019. Masih tentang BANGGA Papua, Fagi melaporkan tentang kegiatan pembayaran dana BANGGA Papua pada tanggal 11 Januari. Tulisan berjudul “Sekber Bayarkan Dana BANGGA Papua kepada Warga Asmat,” dipublikasikan lewat salah satu media cetak Papua, 12 Januari 2019.

Selain BANGGA Papua, Fagi juga sangat aktif menulis berita tentang isu penting lain di Kabupaten Asmat. Berita-berita yang ditulisnya mencakup tentang capaian program yang menggunakan dana Otsus di Kabupaten Asmat, isu tenaga kesehatan, puskesmas, pembangunan infrastruktur di Asmat, tata kelola anggaran dan lain-lain. Hasil liputannya telah dimuat di sejumlah media cetak dan media *online*, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional.

### Berkembang bersama BANGGA Papua

Fagi adalah salah satu peserta pelatihan menulis berita “*Journalism for Non-Journalist*,” yang difasilitasi oleh BaKTI pada bulan September 2018 di Agats, Asmat. Pelatihan itu diikuti oleh beberapa anggota Sekber BANGGA Papua Asmat dan staf Humas Pemkab Asmat.

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan dapat membuat tulisan-tulisan untuk mensosialisasikan program BANGGA Papua.

“Setelah mengikuti pelatihan tersebut, saya lebih percaya diri. Saya jadi berani untuk mendekati dan mewawancarai tokoh-tokoh penting,” kata lelaki lulusan jurnalistik di salah satu perguruan tinggi di Ambon ini. Ia mengaku telah mewawancarai banyak pejabat, tokoh pemuda, pemuka agama, pemimpin adat dan masyarakat awam.

“Melalui pemberitaan yang saya tulis di media, saya berharap dapat membantu membangun citra Asmat ke dunia luar,” ungkap Fagi. “Ketika berinteraksi dengan mereka, saya ikut merasakan gairah dan semangat mereka untuk mengembalikan citra Asmat yang sempat terpuruk oleh pemberitaan tentang gizi buruk. Saya merasakan betapa bersemangatnya pemerintah membangun,” jelas Fagi lagi.

Fagi melihat, sebagai kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke, Asmat memerlukan ruang publikasi untuk menginformasikan perkembangan pembangunan di kabupaten itu, kepada dunia luar. Semangatnya yang tinggi dan kinerjanya yang baik tidak luput dari perhatian Humas Pemkab Asmat. Beberapa bulan terakhir, Fagi mendapat kepercayaan dari Humas Pemkab Asmat untuk melakukan liputan khusus tentang kegiatan-kegiatan Bupati Asmat.

“Bagi saya, mendapat kepercayaan meliput kegiatan Bupati, sudah bikin saya senang dan bangga,” ucap Fagi. “Saya kaget juga. Belum



Fagi mewawancarai Anggota Sekber Provinsi yang juga Koordinator Wilayah Kabupaten Asmat.

Foto : Abd. Rahman Ramlan/Yayasan BaKTI

setahun, saya sudah mengunjungi 20 distrik (kecamatan) di Asmat”. Fagi benar-benar tidak menduga dengan kemajuan yang alaminya.

Sejak awal, Kepala Bagian Humas Pemkab Asmat, Reza Baadila, punya alasan kuat mengutus Fagi untuk mengikuti pelatihan menulis berita yang difasilitasi BaKTI. Ia rupanya melihat potensi Fagi yang besar untuk menjadi seorang jurnalis.

“Rasa ingin tahunya cukup tinggi, dan saya kira itu modal besar untuk menjadi seorang jurnalis,” cerita Reza yang juga anggota Sekber BANGGA Kabupaten Asmat, untuk bidang Komunikasi. Di Humas sendiri, staf yang memiliki kemampuan menulis sangat terbatas. Dengan kehadiran Fagi, Reza berharap berita tentang Asmat semakin banyak dituliskan dan dipublikasikan.

Bagi Fagi sendiri, kehadiran BANGGA Papua memberinya berkah bertemu dengan orang-orang yang disebutnya “orang-orang hebat yang peduli.” Dengan adanya program BANGGA Papua, Fagi mengaku, ia makin bisa mengembangkan bakatnya sebagai penulis.

Setiap tulisan yang berhasil dipublikasikan di media massa, baik terkait program BANGGA Papua maupun tentang isu-isu penting lainnya, Fagi selalu membagikannya kepada anggota grup *whatsapp* bernama Kelas Menulis. Grup ini

beranggotakan peserta pelatihan menulis berita yang difasilitasi oleh BaKTI. Teman-teman sesama alumni memberikan apresiasi atas tindakannya ini. Melalui berita yang dituliskan dan dibagikan, Fagi memberikan informasi perkembangan terkini tentang Asmat.

“Kami butuh lebih banyak orang seperti Fagi. Kalau ada pelatihan serupa di luar Asmat, tolong kabari kami. Biar Fagi bisa ikut lagi. Kami berharap BaKTI dapat memfasilitasi lagi pelatihan-pelatihan sejenis agar lebih banyak jurnalis yang lahir, yang mampu mempublikasikan aktivitas pembangunan di Asmat,” harap Reza.

**BANGGA Papua** adalah program yang diinisiasi oleh Pemprov Papua yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak orang asli Papua, dengan memanfaatkan dana Otonomi Khusus (Otsus). Melalui BANGGA Papua, Pemprov Papua sedang membangun generasi emas Papua. BANGGA Papua menyediakan dana bagi anak orang asli Papua yang berusia di bawah 4 tahun, untuk digunakan membeli atau menyediakan kebutuhan gizi dan kesehatan anak. Dana diberikan langsung kepada ibu dan ditransfer melalui rekening miliknya. Yayasan BaKTI menerima mandat untuk mendukung komunikasi strategis BANGGA Papua, khususnya meningkatkan kapasitas komunikasi pelaksana program di provinsi dan kabupaten.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang BANGGA Papua, dapat menghubungi [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)

**D**ari 390 desa di Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat, hanya 30 yang tidak termasuk kategori tertinggal atau sangat tertinggal. Selebihnya masih diliputi kemiskinan, kurangnya infrastruktur di tengah kondisi alam yang keras, dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Hal-hal ini berdampak pada kualitas pendidikan di kabupaten ini, membuat para siswa memiliki daya saing yang rendah.

“Bukan hal yang tidak umum bagi siswa di sini baru bisa membaca dengan lancar saat mereka ada di kelas VI,” ujar Kartiyus, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sintang.

Pada Juli 2016, Pemerintah Sintang mengadopsi program rintisan KIAT Guru (Kinerja dan Akuntabilitas Guru), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah sangat tertinggal melalui pemberdayaan masyarakat dan pengaitan pembayaran Tunjangan Khusus Guru dengan kehadiran guru atau kualitas layanan guru.

## Kabupaten Sintang Berkomitmen Lanjutkan dan Perluas Program KIAT Guru

*Sintang District is Committed to Continuing and Expanding KIAT Guru Program*

Oleh **HERA DIANI**



*Of the 390 villages in Sintang District in West Kalimantan, only 30 of them are not categorized as disadvantaged or very disadvantaged. The rest is still plagued with poverty, lack of infrastructures amid the harsh terrains, and lack of quality human resources. These have affected the quality of education in this district, resulting in low competitiveness of students.*

*“It is not uncommon for students here to be able to read fluently only when they are at 6th grade,” said Kartiyus, Head of Sintang Development Planning Agency.*

*In July 2016, Sintang government adopted KIAT Guru (Teacher Performance and*



Foto: Abdurrahman Doge/TNP2K

Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan lima Pemerintah Kabupaten yang tergolong daerah tertinggal. Yayasan BaKTI mengelola implementasi program, dengan dukungan teknis dari World Bank dan pendanaan dari Pemerintah Australia dan USAID.

Di Sintang, program ini diimplementasikan di 66 sekolah di 22 desa. Sebuah survei independen menunjukkan dampak sangat positif pada hasil belajar peserta didik dan dukungan orang tua dalam proses belajar, terutama ketika Tunjangan Khusus untuk guru dikaitkan dengan kehadiran

*Accountability) Pilot, which aims to improve education service delivery in remote villages by empowering communities and tying payment of the remote area allowance with either teacher's presence or teacher's service quality.*

*The pilot is a collaboration between the Ministry of Education and Culture, the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K), and governments of five districts with disadvantaged villages. Yayasan BaKTI implements the program with technical supports from the World Bank and funding from the Government of Australia and USAID.*

*In Sintang, the pilot has been implemented in 66 schools in 22 villages. An independent survey*



Foto: Abdurrahman Doge/TNP2K

guru, yang direkam menggunakan aplikasi kamera berbasis android dan diverifikasi oleh perwakilan masyarakat.

“Program ini baru difokuskan pada dua mata pelajaran, Matematika dan Bahasa Indonesia, namun perbaikannya sangat signifikan,” ujar Kartiyus.

Di SDN 06 Nanga Sekapat di Desa Tirtakarya, Kecamatan Merakai, misalnya, kehadiran guru meningkat dari 55 persen menjadi 75 persen. Angka buta huruf menurun dari 2 kasus menjadi tidak ada, sementara angka buta angka menurun dari 5 siswa menjadi nol.

Sementara itu di SDN 40 Lepat Betung, Desa Temawang Bulai di Kecamatan Sepauk, tingkat kehadiran guru naik dari 71 persen menjadi 75 persen. Angka buta huruf turun dari 10 kasus menjadi 2 kasus, sementara tingkat buta angka menurun dari 3 kasus menjadi nol.

Program rintisan ini telah diserahkan ke pemerintah desa pada Desember 2017, dan hampir 10 bulan kemudian, berdasarkan pemantauan bersama oleh TNP2K, Yayasan BaKTI dan Bank Dunia, masih berjalan baik dengan dukungan regulasi dan pendanaan dari pemerintah pusat, kabupaten, dan desa.

Hal ini mendorong pemerintah kabupaten untuk berkomitmen melanjutkan dan memperluas program tersebut. Bupati Sintang

*shows that there are strong effects in student learning outcomes and parental supports for learning, particularly when teacher's remote area allowance is paid based on teacher's presence, as recorded using an android-based camera application and verified by community representatives.*

*“The program has only been focused on two subjects, Math and Indonesian, but the improvement has been remarkable,” said Kartiyus.*

*In SDN 06 Nanga Sekapat, Tirtakarya Village in Merakai Subdistrict, for example, teacher's attendance increases from 55 percent to 75 percent. The illiteracy rate has decreased from 2 cases to zero, while numerical illiteracy rate has dropped from 5 students to zero student.*

*Meanwhile, in SDN 40 Lepat Betung, Temawang Bulai Village in Sepauk Subdistrict, teacher's attendance rose from 71 percent to 75 percent. Illiteracy rate dropped from 10 to 2 cases, while numerical illiteracy cases decreased from 3 to zero.*

*The pilot was handed over to village authorities in December 2017, and nearly 10 months on, based on the joint monitoring by TNP2K, Yayasan BaKTI and the World Bank, it is still running well with the backing of central, district and village level regulations and funding.*



Foto: Abdurrahman Doge/TNP2K

Jarot Winarno mengatakan pada awal Oktober bahwa ia berkomitmen meningkatkan skala intervensi dari 22 desa sangat tertinggal menjadi semua 213 desa sangat tertinggal di kabupaten tersebut.

“Ini harus di-scale up di tingkat distrik semua. Beberapa desa ada yang protes, maunya semua sekolah dapat. Kami ingin agar dirancang supaya semua sekolah yang menerima Tunjangan Khusus tercakup. Mungkin kita bisa mulai di desa sangat tertinggal,” ujarnya.

Kartiyus menyambut ide tersebut, namun ia mengatakan perluasan KIAT Guru perlu dilakukan secara bertahap, mengingat pertimbangan keuangan, sumber daya manusia, dan logistik, serta dukungan peraturan. Ia mengusulkan penambahan 66 sekolah pada 2019.

“Mungkin replikasi dapat dilakukan dari desa tetangga yang tertinggal atau sangat tertinggal. Hal-hal yang berkaitan dengan keperluan logistik pun jadi lebih mudah,” ujarnya.

“Tapi memang kita memerlukan perluasan ini karena ini sejalan dengan visi misi kita untuk terciptanya masyarakat yang cerdas.”

*This has led to the commitment from the district to continuing and expanding the program. Sintang District Head Jarot Winarno said in early October that he is committed to scaling this intervention from 22 to all 213 very disadvantaged villages in the district.*

*“It has to be scaled up at the entire district. Some villages protested as to why their schools are not targeted by this program. We want all schools with special allowance to be covered, but we need assistance. Maybe we can start by implementing it in very disadvantaged villages,” Jarot said.*

*Kartiyus welcomed the idea to expand the KIAT Guru program, but he said it was more feasible to expand it in stages, given the financial, human resources, and logistical considerations, as well as regulatory support. He suggested adding 66 schools in 2019.*

*“Maybe we can start the replication from the neighboring villages with disadvantaged or very disadvantaged status. It will be easier in terms of logistical issues,” he said.*

*“But we do need the expansion as it is in line with our vision and mission to educate and create smart generations.”*

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program KIAT Guru, dapat menghubungi [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)

# Peraturan Desa untuk Kesejahteraan Perempuan

Oleh **BAIQ TITIS YULIANTY**

**B**erawal dari diskusi saat rapat internal staf Sub Office NTB pada awal Januari lalu, disepakati bahwa perlu ada satu desa yang dapat dijadikan *role model* bentuk-bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak di lokasi dampingan Program MAMPU BaKTI. Meskipun secara undang-undang negara telah memberikan perlindungan kepada kaum perempuan namun pelaksanaan dari undang-undang tersebut belum memberikan dampak positif secara nyata. Sehingga perlu ada aturan yang dapat mengikat di tingkat desa.

Bentuk peraturan tersebut bisa berupa Peraturan Desa (Perdes) ataupun revitalisasi awig-awig (*local wisdom*) yang telah berkembang di masyarakat. Selanjutnya tim melakukan identifikasi desa dampingan yang siap untuk dijadikan sebagai *pilot project*. Dari sepuluh desa dampingan, Desa Kembang Kerang menjadi salah satu desa terpilih dengan pertimbangan bahwa desa tersebut pada tahun 2016 sudah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai desa Anti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), sehingga sangat tepat jika diperlukan legislasi untuk perlindungan perempuan dan anak di desa tersebut. Tetapi, tentu saja hal ini akan diserahkan kepada keputusan kepala desa.

Tiga hari setelah keputusan tersebut disepakati, Tim MAMPU-BaKTI NTB berkunjung ke Desa Kembang Kerang untuk menemui kepala desa yang baru saja dilantik, Yahya Putra, yang sebelumnya juga merupakan Ketua Kelompok Konstituen Desa Kembang Kerang. Gayung bersambut, belum juga tim menyampaikan rencana tentang menjadikan Desa kembang

Kerang sebagai Desa Pilot untuk perlindungan perempuan dan anak. Kepala Desa telah terlebih dahulu menyampaikan rencana untuk menindaklanjuti apa yang pemerintah kabupaten telah canangkan di desanya tahun 2016 lalu. “mohon masukan dari rekan-rekan, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan Kembang Kerang sebagai Desa Anti KDRT, paling tidak ini dapat mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan”.

Tentu saja ungkapan Pak Yahya tersebut kami sambut dengan suka cita karena apa yang dilakukan atas permintaan masyarakat yang telah memiliki kesadaran untuk melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sekali lagi, kesepakatan sudah dicapai. Desa Kembang Kerang akan menyusun Perdes tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dengan demikian desa ini akan menjadi *Desa Pilot Project* Program MAMPU-BaKTI untuk bentuk-bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dapat menjadi acuan serta membuka ruang replikasi bagi desa lainnya.

## Kondisi Perempuan dan Anak di Desa Kembang Kerang

Tidak jauh berbeda dengan tempat-tempat lain di pelosok tanah air, Perempuan di Desa Kembang Kerang masih terkungkung dalam “ketidakberdayaan”. Hal ini yang menyebabkan perempuan memiliki partisipasi yang sangat rendah dalam pembangunan di desanya. Sering terjadi pemiskinan hak, karena kesempatan untuk berperan dalam rapat pengambilan keputusan pembangunan di desa tidak mereka dapatkan. Kondisi ini semakin diperparah karena adanya sikap “penerimaan” dari perempuan yang diukur sebagai kodrat mereka.

Disakiti secara verbal tidak dikategorikan sebagai tindak kekerasan psikis, karena itulah kodrat mereka, menerima apapun sikap yang dilakukan oleh suami. Ketika terjadi pemukulan pun, perempuan akan berusaha menyembunyikan luka yang mereka terima. Karena akan menjadi aib jika ada orang yang mengetahuinya atau jika mereka melakukan pelaporan kepada Kepala Dusun atau Kepala Desa, maka perempuan tersebut akan dicap sebagai perempuan “kurang ajar”. Tidak hanya itu, perempuan juga tidak mengetahui apa saja hak



Foto: Baiq Titis Yulianty/Yayasan BaKTI

mereka ketika mengalami perceraian, tidak mengetahui bahwa mereka mendapatkan hak perlindungan oleh negara ketika mengalami kekerasan bahkan mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan ketika hak mereka diabaikan saat pembagian warisan.

Kondisi anak pun tidak jauh berbeda, masih tingginya angka perceraian dan pernikahan usia anak juga menjadi penyebab kurangnya perhatian terhadap anak. Ketika terjadi perceraian, anak menjadi sepenuhnya tanggungjawab ibu. Peran kepala keluarga secara otomatis berpindah kepada perempuan, urusannya tidak lagi pada pekerjaan domestik saja melainkan juga mencari nafkah.

Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tidak banyak memberikan pilihan pekerjaan bagi mereka, kecuali sebagai buruh tani. Pada kondisi ini, seringkali anak terabaikan, baik perhatian, kasih sayang, maupun pendidikan. Dalam kasus pernikahan usia anak juga demikian, hampir 70% pernikahan dini berujung perceraian (DP3AKB, 2017). Kembali perempuan menjadi korban, anak menjadi tanggungjawab mereka sepenuhnya. Satu jalan pintas yang sering menjadi pilihan bagi mereka adalah menjadi buruh migran. Dengan harapan akan memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Namun kembali, pendidikan dan keterampilan yang rendah justru menjadi bumerang bagi perempuan yang menyeret mereka pada kasus *trafficking*. Masa depan anak kembali dipertaruhkan. Anak-anak tidak sekolah dan salah pergaulan.

Saat ini, Kepala Desa dan anggota Kelompok Konstituen Mele Maju sedang berusaha keras agar hak-hak perempuan dapat terpenuhi sehingga akan meningkatkan peran serta mereka dalam pembangunan di desanya.

#### Proses Penyusunan Peraturan Desa

Proses penyusunan Perdes pun berjalan, beberapa tahapan yang dilakukan adalah pertama dilakukan adalah koordinasi dengan fasilitator tentang tahapan yang akan dilakukan untuk penyusunan peraturan tersebut. Beberapa tahapan yang akan ditempuh adalah:

Pertama, *workshop* untuk pelatihan penyusunan Perdes yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2018. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta akan pentingnya perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan/anak (KtP/A) di desa/tingkat komunitas serta berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak. Pada pelatihan ini peserta tidak hanya perwakilan dari berbagai unsur yang ada di Desa Kembang Kerang saja melainkan juga dari Desa Aikmel dengan harapan pelatihan ini akan dapat menjadi salah satu referensi jika desa tersebut juga akan menyusun peraturan serupa.

Ada beberapa hal menarik dari pelatihan tersebut, di antaranya adalah peserta memiliki perspektif yang sama bahwa perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Adanya komitmen dari pemerintahan Desa

## KONSULTASI PUBLIK

# “ RANPERDES PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK ” DI DESA KEMBANG KERANG LOMBOK TIMUR

LOMBOK TIMUR, 09 MEI 2018



Foto: Baiq Tritis Yulianty/Yayasan BaKTI

untuk mendorong lahirnya Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Kembang Kerang. Terjalannya komunikasi aktif para peserta dalam memberikan masukan untuk Draft Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak.

Terbangunnya sinergi dari para pihak baik dari pemerintah desa maupun kelompok konstituen dalam penanganan korban KtP/A di Desa Kembang Kerang.

Kedua, penyusunan Draft Perdes. Dalam tahapan ini dikuti oleh perwakilan unsur pemerintah desa dan masyarakat di antaranya adalah Kepala Desa, perwakilan staf Desa, Kepala Dusun, ketua dan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan perwakilan masyarakat, yang selanjutnya disebut sebagai tim kecil penyusun Perdes.

Saat proses penyusunan Draft Perdes, peserta dibagi ke dalam tiga kelompok yang disertai dengan tugas sebagai berikut: kelompok I menyusun latar belakang, kelompok II menyusun bagian pembukaan Perdes, dan kelompok III menyusun Batang Tubuh Perdes. Selama sehari penuh tim kecil berdiskusi memetakan kebutuhan sesuai dengan hasil diskusi peserta saat pelatihan penyusunan Perdes sebelumnya. Hasil pemetaan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam setiap pasal dalam batang tubuh Perdes.

Ketiga, melakukan beberapa kali perbaikan maka pada tanggal 9 Juli 2018 dilakukan Konsultasi Publik Draft Perdes tersebut. Konsultasi publik ini dihadiri oleh lebih dari 70 orang yang merupakan perwakilan dari seluruh elemen masyarakat desa seperti BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota Kelompok Konstituen, perwakilan Kader, Polmas, Babinsa, Bidan/perawat Pustu Desa Kembang Kerang, Karang Taruna, perwakilan guru, eks buruh migran perempuan dan korban kekerasan. Sungguh di luar dugaan, persentase kehadiran perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki. Demikian pula antusiasme mereka dalam diskusi memberikan masukan untuk melengkapi Perdes tersebut.

Beberapa masukan dari kaum perempuan adalah, perlu ada pasal khusus yang membahas tentang pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Tidak hanya anak laki-laki, tetapi juga hak yang sama diperoleh anak perempuan. Perlu dimasukkan juga pentingnya perempuan mengetahui hak-hak mereka ketika menjalani proses perceraian dan pasca perceraian, serta perlunya sosialisasi hak perempuan dalam hal bagi waris (pembagian warisan) baik menurut adat, agama, dan hukum negara.

Atas berbagai masukan tersebut, Tim Penyusun melakukan perbaikan draft Perdes dan dilakukan pengesahan di hari yang sama. Dengan

demikian dihitung sejak tanggal 9 Juli 2018, Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Kembang Kerang resmi berlaku.

### Upaya Menjawab Kekhawatiran Masyarakat

Pada hari disahkannya Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Kembang Kerang, beberapa saat setelahnya, Ewi Istariana, salah seorang peserta yang hadir menyaksikan penandatanganan Perdes mengacungkan tangannya seraya berkata, “Bapak, Ibu, mohon maaf sebelumnya. Saya sangat terharu dan bahagia sekali dengan adanya Peraturan Desa ini. Namun, sebagai masyarakat dan juga kelompok Konstituen saya khawatir tentang bagaimana mengimplemmentasikan Perdes tersebut. Serta bagaimana kami bias mengukur keberhasilan dari Perdes tersebut?”

Ternyata kekhawatiran yang sama juga kami rasakan, untuk beberapa bulan ke depan kami bisa memantau implementasi Perdes tersebut. Namun bagaimana jika Program MAMPU-BaKTI berakhir, apakah Perdes ini akan masih bisa berjalan? Ataukah hanya akan menjadi penghias laci atau bahkan akan dikilokan ke penjual kacang rebus?

Kekhawatiran antara kami dan masyarakat memiliki benang merah yang harus segera ditemukan untuk menjawabnya. Hal tersebut menjadi bahan diskusi Tim Penyusun dan para saksi yang hadir dalam Forum tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama, kesepakatan pun diperoleh. Pertama, perlu ada semacam *roadmap* atau *workplan* yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam implementasi Perdes. Dengan demikian, arah dan *output* yang akan dicapai dalam setiap tahun akan lebih jelas dan terukur. Kedua, perlu segera melakukan penyusunan *workplan* agar amanat dalam Perdes segera dilaksanakan.

Manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Itulah kenyataan yang kami hadapi. Pada tanggal yang disepakati yaitu di akhir Juli, tanpa disangka bencana alam melanda Pulau Lombok. Gempa dengan kekuatan 6,4 SR mengguncang Lombok timur pada pagi 29 Juli, dan kejadian ini terus berlanjut selama sebulan berikutnya dengan Magnitudo mencapai 7,0. Tentu saja, kejadian alam ini menghentikan berbagai aktifitas program. Kami lebih fokus pada berbagai kegiatan tanggap bencana.

Namun ternyata, bencana tidak menghalangi semangat Kades dan masyarakat Desa Kembang Kerang untuk mewujudkan kesejahteraan perempuan melalui Perdes yang telah mereka susun. Pada awal September, kami menerima telepon dari Kepala Desa, beliau menagih janji tentang *workplan* tersebut. “Bu, kami membutuhkan fasilitasi untuk menyusun rencana kerja agar kami bisa menerapkan Perdes. Bencana ini justru menjadi penyemangat kami, bagaimana pun perempuan harus bangkit kembali pasca bencana”. Semangat yang luar biasa. Tanpa menunggu lama, kami pun mempersiapkan berbagai hal yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Dan pada tanggal 24-25 September Workshop Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perlindungan Perempuan dan Anak kami laksanakan di Aula Kantor Desa Kembang Kerang.

Awalnya kami hanya berpikir untuk menyusun rencana kerja untuk mengawal pelaksanaan Perdes. Akan tetapi sungguh diluar dugaan, kembali antusiasme masyarakat mengawal Perdes sangat luar biasa. “tidak cukup 5 tahun untuk mewujudkan kesejahteraan perempuan seperti visi dalam Perdes tersebut. Tapi kita butuh 5 (lima) kali periode Kepala Desa. Artinya perlu ada dokumen perencanaan perlindungan perempuan dalam jangka panjang, semacam GBHN dulu” ucap Ketua BPD, Bapak Subiardi, saat mengikuti workshop tersebut.

Apa yang disampaikan oleh Ketua BPD tersebut tidak mendapatkan satu pun penolakan dari peserta yang hadir. Semua sepakat untuk menyusun Rencana Strategis dengan jangka panjang 30 tahun dan jangka menengah 6 tahun (sesuai dengan periode Pemerintahan Kepala Desa). Program setiap tahun akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Sungguh luar biasa ini, Perdes Desa Kembang Kerang ini menjadi Perdes pertama di Lombok yang memiliki Renstra jangka panjang 30 tahun. Tidak bisa kami bayangkan, jika semua desa memiliki semangat yang sama dalam memperjuangkan kesejahteraan perempuan. Tentu, kekerasan dan ketidakadilan bagi perempuan dan anak akan dapat terhapuskan. Salut untuk masyarakat Desa Kembang Kerang.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program MAMPU BaKTI, dapat menghubungi [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)



Oleh **WAHYUDIN OPU**

# MENANAM SAGU DI KEPALA

**M**alam baru saja dimulai di Kampung Yepem. Di rumah Mama Katarina dan Mama Fransina, kami sedang menunggu matangnya sagu bola dan ikan duri yang sedang dibakar di tungku api. Penganan sederhana yang dimasak dengan cara sangat sederhana tersebut menjadi pengisi perut kami malam itu. *“Ambas akat ooo, sagu enak.”*

Jawaban Mama Katarina sesingkat itu saat saya tanya tentang makan malam kami yang baru saja meluncur ke lambung. Kami semua tertawa. Walaupun saya tahu persis alasannya lebih dari itu. Bagi masyarakat suku Asmat, sagu bukanlah sekedar makanan. Ia sudah menjadi bagian dari laku kebudayaan yang mengakar sejak masa leluhur.

Dalam banyak cerita leluhur atau mitologi orang Asmat, sagu sering disebut sebagai bagian dari sejarah pertumbuhan suku di pesisir selatan Papua ini. Misalnya saja Beworpit, leluhur yang paling sering disebut dalam cerita adat.



(Kiri-Kanan) Sebagian besar proses pangkur sago (proses pengolahan batang utama pohon sago untuk mendapatkan tepung sago) dilakukan oleh perempuan Asmat.  
Foto : Regista

Berworpit dikisahkan adalah penemu tanaman sago di dalam rimba Asmat. Ia pula yang mengorbankan dirinya dengan berubah wujud menjadi pohon sago agar tanaman rawa tersebut bisa terus ada bagi generasi penerusnya. Heroisme Beworpit itu terus hidup sebagai leluhur penyedia kehidupan bagi orang Asmat.

Dalam cerita lain, sago merupakan makanan utama bagi kepala perang beserta prajuritnya pada masa pengayauan. Mereka percaya dengan memakan sago badan bisa menjadi lebih kuat. Tenaga bertempur bisa tahan lama. “Kalau makan (makanan) yang lain, misalnya ikan sembilang, pisang doaka (pisang gepok), itu

badan bisa jadi lemas. Tidak kuat ikut perang,” kata Felix Owom, Ketua Adat Asmat di Kampung Suwruw.

Dalam tatanan sosial, sago sudah dianggap sebagai harta benda utama bagi masyarakat Asmat. Pada ritual pernikahan Asmat, sago menjadi seserahan wajib bersama kapak batu. Kedua benda itu menjadi simbol perbekalan bagi sepasang mempelai yang baru akan mengarungi rumah tangga. Selain itu, ulat sago menjadi panganan wajib dalam banyak ritual adat Asmat. Biasanya bakal kumbang sago ini akan disantap bersama pada puncak helatan pesta.

#### **Potensi Sago vs Ketahanan Pangan**

Asmat bersama daerah di dataran rendah di Papua memang dikenal sebagai lumbung sago sejak dahulu. Menurut penelitian Nadirman Haska, seorang profesor riset di bidang



bioteknologi dan agroteknologi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Papua tercatat memiliki 1,2 juta hektar lahan yang ditumbuhi pohon sagu. 95 persen diantaranya tumbuh alami di hutan dataran rendah dan belum dimanfaatkan.

“Papua berpotensi menghasilkan delapan juta ton sagu per tahun dari pohon yang tumbuh alami dan belum dimanfaatkan tersebut. Tapi karena kita tidak memanfaatkannya, potensi pangan tersebut hilang begitu saja,” Kata Nadirman.

Masih menurut Nadirman, sebagai sumber pangan potensial, sagu memiliki keunggulan tersendiri. Sagu dalam wujud tepung bisa diolah menjadi berbagai produk makanan. Karbohidrat yang terkandung di dalam sagu juga cukup tinggi dan mudah dicerna. “Sagu itu tidak memerlukan lahan yang luas dan mampu tumbuh tanpa perawatan intensif. Kalau mau serius, sagu bisa menjadi pendukung upaya Indonesia mewujudkan swasembada pangan,” jelasnya.

Sayangnya segala potensi itu masih kabur dari penglihatan pemerintah Indonesia. Program swasembada pangan yang dimulai sejak masa orde baru hanya mengandalkan beras semata. Pangan lokal yang tersebar di berbagai daerah dan menjadi bagian identitas keberagaman nusantara dilupakan begitu saja. Awalnya program ini terlihat gilang-gemilang mengantarkan Indonesia menyandang predikat

**Pohon Sagu tidak memerlukan lahan yang luas dan mampu tumbuh tanpa perawatan intensif. Kalau mau serius, sagu bisa menjadi pendukung upaya Indonesia mewujudkan swasembada pangan.**

Foto : Regista

sebagai salah satu negara yang mampu mencukupi pangan dalam negeri. Tapi tanpa upaya diversifikasi jenis pangan, swasembada pangan (lebih tepatnya swasembada beras) hanyalah program yang rapuh. Akibat korupsi besar-besaran, ia ikut runtuh bersamaan dengan berakhirnya orde baru.

Pemerintah penerus kemudian seolah gugup dan gagap dalam menyikapi masalah pangan ini. Mereka seperti tidak bisa berpikir banyak saat melihat masyarakat yang telah mengalami ketergantungan beras. Demi meneruskan program ketahanan pangan, ribuan lahan diubah menjadi sawah. Di Papua hutan dibuka untuk ditanami padi. Masyarakat pemburu peramu didorong (atau dipaksa) menjadi petani. Ya, tentu saja salah sasaran. Mana bisa orang-orang yang terbiasa hidup dengan memanfaatkan hutan seketika disuruh berbudi daya.

Sementara itu, di berbagai tempat, termasuk juga di Asmat, alam bawah sadar masyarakat terus dipengaruhi oleh kebijakan berasisasi. Masyarakat yang dikategorikan tidak mampu disuplai beras miskin atau raskin oleh negara. Beras dengan kualitas rendah ini tidak pernah

cukup menghidupi masyarakat dalam sebulan. Mereka harus tetap berusaha mencari tambahan makanan untuk menyambung hidup.

### Menanam Harapan pada yang Lokal

Sudah saatnya pemerintah membuka mata untuk mulai memaksimalkan potensi pangan lokal kita, terutama sagu. Sudah terlalu lama potensi kita ini disia-siakan. Mimpi ketahanan pangan sangat riskan bila hanya dibebankan pada beras semata. Bukankah keragaman kita juga bersumber dari beranekanya pangan lokal kita?

Cobalah turun ke masyarakat untuk melihat sekaligus belajar betapa kearifan lokal yang selama ini diterapkan berhasil membuat masyarakat adat hidup selaras dengan alam. Saya rasa pemerintah lewat konsultan-konsultannya yang pandai-pandai itu harus melepaskan sedikit ego mereka. Nilai-nilai dalam kearifan lokal masyarakat adat perlu dihormati bahkan dirangkul dalam proses modernisasi sistem produksi pangan. Perpaduan antara yang modern dan yang lokal saya kira akan memberikan hasil maksimal sekaligus meningkatkan kepercayaan diri masyarakat tradisional.

Saya pernah beberapa kali mengikuti masyarakat Asmat memangkur sagu di dalam hutan keluarga mereka. Pekerjaan yang dijalankan dengan sangat tradisional ini menampilkan kekayaan tradisi yang erat dengan penghormatan pada alam. Tidak sembarangan pohon sagu yang boleh ditebang. Pada beberapa lokasi hutan, suku Asmat menerapkan metode konservasi tradisional bernama *dusun keramat*. Penetapan *dusun keramat* dilakukan untuk melindungi hutan yang menjadi bagian dari sejarah leluhur mereka. Tidak boleh ada yang merusak ekosistem di tempat *keramat*. Bagi yang berani melanggar, sanksinya tidak main-main: kematian. "Pelanggaran itu termasuk *teser* (jenis *pamali* paling berat dalam sistem hukum adat Asmat)," kata Walter Ewenmanam, salah satu Tetua Adat Asmat di Kampung Yepem.

Wilayah hutan yang bukan termasuk tempat *keramat* adalah tempat masyarakat Asmat mencari makan, mulai dari memangkur sagu sampai berburu binatang. Namun hanya hutan keluarga, atau yang biasa disebut *dusun*, yang

boleh mereka garap. Selain itu mereka sangat memperhatikan keadaan *dusun*. Saat kondisi *dusun* dianggap mulai *gundul*, mereka akan menerapkan ritual *pisis*. Lokasi yang diberi *pisis* tidak boleh digarap dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada *dusun* yang *gundul* tadi untuk tumbuh kembali secara alami. Hal ini mirip dengan tradisi *Sasidi* Maluku.

Namun di balik kekayaan pengetahuan tradisional masyarakat Asmat dalam memanfaatkan hutan, teknik tradisional dalam memangkur sagu yang mereka terapkan sangatlah terasa berat. Mereka bisa menghabiskan tenaga sepanjang hari untuk menebang pohon sagu, menguliti, memangkur, sampai menyaring pati menjadi tepung sagu. Lagi pula dengan cara tersebut hasil yang didapatkan tidak terlalu maksimal. Dalam sehari dua orang hanya mampu menggarap satu buah pohon sagu. Hasil tepung sagu yang bisa dihasilkan dari satu pohon itu sekitar dua sampai tiga *noken* (seukuran karung beras 25 kilogram).

Di sinilah intervensi pemerintah lewat penerapan teknologi dibutuhkan. Sudah seharusnya *sentra-sentra* pengelolaan dibangun di lokasi yang memiliki potensi sagu yang besar. Bersamaan dengan itu pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam proses produksi juga harus berjalan. Dengan begitu kepercayaan diri masyarakat turut terbangun karena melihat potensi dan pengetahuan mereka ikut dilibatkan.

Pemerintah kita sudah harus mulai berpikir ulang tentang konsep "menanam" yang selama ini terus mereka paksakan dalam program ketahanan pangan. Jangan hanya membuka lahan raksasa tapi mengabaikan tata hidup yang selama ini masyarakat bangun. Kepala masyarakat perlu ditanamkan imajinasi tentang kesejahteraan lewat potensi mereka sendiri. Sumber daya alam kita sudah sangat melimpah. Hari ini waktunya menanam harapan, demi menuai kebaikan di masa depan.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

\*Tulisan ini terinspirasi oleh lagu Menanam milik band folk Makassar, Kapal Udara.

Wahyudin Opu, email: [wahyudinopu@gmail.com](mailto:wahyudinopu@gmail.com)

Sumber : <http://whyopu.blogspot.com>



# Membangun Rumah dengan Empati dan Partisipasi

Oleh **YUDI WIJANARKO**

**S**anariah, janda miskin beranak 4 itu tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Dia bersama keempat anaknya hidup di rumah yang tak layak. Kondisinya nyaris roboh, bahkan bangunan yang ditinggalinya itu lebih mirip kandang. Reyot dan tak berbentuk. Bertahun mereka tinggal di sana Sanariah ditinggal pergi

suaminya, menghidupi keempat anaknya tanpa pekerjaan. Tapi Tuhan memang Tak Tidur. Rejeki selalu mendatangi mereka. Kini kehidupan kelima jiwa itu ditopang pendapatan anak pertama (yang mengalami keterbelakangan mental) yang bekerja serabutan sebagai kuli panggul di pasar. Sanariah tak hanya miskin, ia pun tak bisa baca tulis. Sanariah juga tak tahu umurnya berapa.



Ibu Sanariah bersama anaknya didepan Rumah baru mereka yang dibangun dengan bantuan UPZ BAZNAS dan warga (Kiri). Kesibukan sehari-hari Ibu Sanariah, yang hidup mengandalkan penghasilan anak tertuanya yang bekerja sebagai kuli panggul.

Foto : Hamsah Sinring/Yayasan BaKTI

Koordinator UPZ BAZNAS Kecamatan Maiwa, Hamdan Nasir mengatakan, mendapat permintaan itu, pihaknya mengunjungi rumah Sanariah. Berdasarkan pengamatan dan perhitungan, biaya perbaikan rumah Sanariah di atas plafon bantuan BAZNAS Kabupaten Enrekang. Berdasarkan ketentuan BAZNAS Enrekang, plafon setiap bantuan bedah rumah yang diberikan maksimal 10 juta rupiah. Ketika hal itu disampaikan kepada warga, mereka menyatakan menyanggupi untuk menambah kekurangan biayanya. Hamdan lalu berkoordinasi dan melaporkan hal itu kepada BAZNAS

Kabupaten Enrekang untuk mendapatkan petunjuk pelaksanaan bantuan perbaikan rumah tersebut.

“Menurut hitungan kami, total biaya perbaikan rumah Ibu Sanariah lebih dari 10 juta rupiah. Kami sampaikan hal itu kepada tokoh masyarakat di sini dan mereka menyanggupi akan menambah kekurangan biaya dengan cara bergotong royong dan sumbangan warga,” jelas Hamdan Nasir.

Empati warga kepada nasib Sanariah dibuktikan dengan banyaknya sumbangan yang diberikan. Warga suka rela menyumbang tenaga, batu bata, semen, pasir dan kebutuhan lainnya. Tenaga tukang juga dari warga dan tanpa bayaran. Semua dikerjakan secara gotong royong, bahkan makan tukang pun ditanggung warga tanpa melibatkan Sanariah, si penerima bantuan. Menurut Hamdan, sesuai petunjuk dari BAZNAS Kabupaten, penerima bantuan harus betul-betul dibebaskan dari biaya dan beban apapun. Artinya, jangan sampai penerima bantuan malah dibebani berbagai kebutuhan.

Rumah di mana mereka tinggal terpisah dari perkampungan warga. Mereka nampak tak bertetangga di kanan kirinya. Lokasinya di sebuah ladang yang akses jalannya tak layak, sepotong jalan kecil yang becek di musim hujan dan tak bisa dilalui kendaraan. Rumah Sanariah pun tak ada listriknya termasuk tak ada sarana air bersih dan sanitasinya. Bertahun Sanariah dan keluarganya tinggal di sebuah “kandang” semacam itu. Mereka menjalani hari-hari tanpa kepastian perbaikan nasib akan datang.

Sampai pada suatu hari di awal tahun 2018, seorang ibu iba melihat kehidupan janda dan keempat anaknya itu. Si ibu, yang juga salah seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Bangkala mendatangi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kecamatan Maiwa. Si ibu meminta UPZ BAZNAS Maiwa bisa membantu perbaikan rumah Sanariah.



**Selain ibu Sanariah, beberapa warga miskin mendapatkan bantuan UPZ BAZNAS dan warga. (kiri-tengah) Sebuah rumah warga sebelum dan sesudah direnovasi.**

Foto : Dok. Pokja AMPL

Mereka harus benar-benar bebas dari tanggungan apapun.

Wakil Ketua IV Bidang Administrasi Umum dan Pengembangan SDM BAZNAS Kabupaten Enrekang, Ilham Kadir menegaskan, pola membangkitkan empati dan partisipasi warga menjadi model pelaksanaan bantuan yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Enrekang. Dikatakan, pihaknya benar-benar hanya memberikan dana pancingan pada sebuah kegiatan bantuan dan dana selebihnya ditanggung bersama oleh warga di sekitar penerima bantuan. Pola demikian menurutnya membawa dampak positif pada munculnya sifat gotong royong di tengah masyarakat.

“Kami memberikan dana bantuan maksimal 10 juta rupiah. Ada kalanya tidak sampai sebesar itu jika kondisi rumahnya tidak parah. Kalau seperti rumah Ibu Sanariah kami maksimalkan 10 juta dan itu masih kurang. Kekurangan tersebut dipenuhi warga. Empati dan partisipasi warga di sini sangat luar biasa, karena semua kekurangan pembangunan rumah ini jika ditotal sampai 30 jutaan,” kata Ilham Kadir saat ditemui di rumah Sanariah.

Ditambahkan, BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki misi bahwa setiap bantuan yang diberikan harus bernilai lebih, tidak sekedar bermakna bantuan uang. Nilai lebih yang dimaksud adalah tumbuhnya nilai-nilai kegotongroyongan berupa partisipasi aktif masyarakat sekitar. Ajaran Islam, ujarnya, tidak

sekedar hanya ibadah ritual kepada Allah SWT, namun juga berupa ibadah sosial atau kesalehan sosial bisa tumbuh. Kesalehan sosial tumbuh jika antar umat saling bekerjasama.

“Jangan sampai kita ke surga sendirian. Ke surga harus bersama-sama. Nilai itu bisa didapatkan jika kita peduli dan memiliki empati pada tetangga atau umat di sekitar kita,”ujarnya.

Ditegaskan pula, empati dan partisipasi warga di sekitar calon penerima bantuan menjadi syarat kemudahan cairnya bantuan. Selain itu, di rumah yang akan dibangun atau renovasi juga harus direncanakan adanya sarana air bersih dan sanitasi. Kedua syarat itu berlaku mutlak untuk semua bantuan yang telah disalurkan. Menurutnya, pihaknya tak hanya ingin memperbaiki rumah rusak menjadi baik saja, namun juga memperbaiki kualitas kesehatannya dengan penyediaan sarana air minum dan sanitasi.

Lantas seperti apa koordinasi BAZNAS dengan masyarakat sekitar lokasi bantuan?

Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Enrekang, Baharudin menyatakan, sebelum pengucuran anggaran dan pelaksanaan pembangunan atau renovasi dilakukan, UPZ sekitar lokasi bantuan membentuk Kelompok Kerja (Pokja). Pokja beranggotakan UPZ, Kepala Desa/Lurah dan warga masyarakat sekitar. Pokja ini bertugas merencanakan sampai melaksanakan kegiatan, mulai rapat perencanaan, menghitung kebutuhan dan mengkoordinir bantuan atau penggalangan bantuan dari warga untuk menutupi biaya yang dibutuhkan.

“Kami memberikan dana operasional untuk Pokja sebesar 1 juta rupiah untuk kelancaran



Foto: Dok. Pokja AMP

pelaksanaan kegiatan mulai rencana hingga kegiatan selesai dilaksanakan,” ujar Baharudin.

Menyinggung jumlah kepala keluarga yang sudah dibantu hingga akhir tahun 2018 ini, Baharudin menyampaikan total sudah ada 106 kepala keluarga dengan nilai total bantuan sekitar 948 juta rupiah. Kegiatan ini dimulai tahun 2016 dengan jumlah kepala keluarga yang dibantu sebanyak 15 kepala keluarga, dan tahun 2017 meningkat menjadi 45 KK dan tahun ini sudah sebanyak 46 kepala keluarga

Baik Ilham Kadir maupun Baharudin serempak menyatakan, untuk anggaran bedah rumah bersanitasi di tahun 2019, pihaknya mengalokasikan anggaran 550 juta rupiah. Nilai bantuan per Kepala Keluarga naik dari 10 juta rupiah menjadi 15 juta rupiah. Baharudin menambahkan, pihaknya mulai memprioritaskan sanitasi karena dampak yang ditimbulkan akibat sanitasi buruk cukup mengkhawatirkan. Mulai tahun 2019 pihaknya mulai fokus untuk pencegahan stunting.

“Enrekang menjadi daerah rawan *stunting* oleh karenanya tahun depan kami fokus ke sana dengan perbaikan sarana sanitasi dan menambah alokasi anggarannya,” jelas Baharudin.

Ditambahkan, hakikatnya BAZNAS menjadi instrumen pemerintah untuk menjangkau warga sasaran yang tak mendapatkan program pemerintah. Baharudin mengatakan, BAZNAS fokus pada kondisi masyarakat yang “sekarat” dan di luar jangkauan pemerintah. BAZNAS juga sangat membantu program-program Bupati, karena warga yang meminta bantuan ke Bupati langsung diarahkan ke BAZNAS.

### Warga miskin lainnya yang dibangun sarana MCK yang layak.

Foto : Hamsah Sinring/Yayasan BaKTI

Pola kerjasama yang saling mendukung dengan Bupati ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan pengumpulan dana ZIS. Menurutnya, jika tahun 2016 BAZNAS hanya bisa mengumpulkan dana ZIS masyarakat sebesar 220 juta rupiah, tahun 2017 naik signifikan menjadi 4,8 miliar rupiah dan tahun 2018 menjadi 6,5 miliar rupiah. Hal itu antara lain berkat Peraturan Bupati untuk pengumpulan dana ZIS dari aparat sipil negara di lingkungan Pemkab Enrekang.

Bupati juga memberikan hibah bagi BAZNAS untuk mendukung operasional sebesar Rp 380 juta pada tahun 2016, naik menjadi 500 juta rupiah tahun 2017 dan 2018 serta tahun 2019 mendatang bertambah lagi menjadi 750 juta rupiah.

Kerjasama serta dukungan Bupati itu diapresiasi BAZNAS Pusat dengan memberikan BAZNAS Awards tahun 2018 kepada BAZNAS Enrekang untuk Kategori Kepala Daerah Pendukung Kebangkitan Zakat. Oleh karena itu pula BAZNAS bersama Bupati diundang ke acara World Zakat Forum di Malaysia awal bulan Desember 2018 ini. Di Sulawesi Selatan, hanya tiga kabupaten/kota yang diundang ke acara tersebut yakni Kabupaten Enrekang, Barru dan Kota Makassar.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Provincial Sanitation Development Advisor, USDP Sulawesi Selatan dan dapat dihubungi lewat email: [ydwijanarko@yahoo.com](mailto:ydwijanarko@yahoo.com)

# Pemberdayaan Masyarakat Tingkatkan Hasil Pendidikan di Daerah Sangat Tertinggal

Oleh **HERA DIANI**

**M**eningkatkan kesejahteraan guru telah menjadi fokus prioritas upaya-upaya Pemerintah Indonesia untuk memperkuat sektor pendidikan dan mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Pemerintah pusat dan daerah telah mengalokasikan 20 persen anggaran mereka untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

Namun studi baru-baru ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan guru tidak mengarah pada hasil belajar murid yang lebih baik, dan angka ketidakhadiran guru di daerah sangat tertinggal tetap tinggi.

Untuk meningkatkan kehadiran guru, program rintisan KIAT Guru (Kinerja dan Akuntabilitas Guru) memberdayakan komunitas untuk meminta pertanggungjawaban guru lewat Komite Pengguna Layanan (KPL).

Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan lima Pemerintah Kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal. Yayasan BaKTI mengelola implementasi program, dengan dukungan teknis dari World Bank dan pendanaan dari Pemerintah Australia dan USAID.



## Proses Kerja KPL

Para guru diminta pertanggungjawabannya melalui kesepakatan yang disebut janji layanan antara KPL dan guru. Janji layanan ini memprioritaskan indikator-indikator layanan dari bawah untuk meningkatkan kondisi belajar siswa.

Di beberapa sekolah rintisan, KIAT Guru memberlakukan mekanisme pembayaran Tunjangan Khusus berdasarkan kinerja guru. Pembayaran berdasarkan kinerja ini didasarkan pada verifikasi KPL terhadap kehadiran guru, atau skor kinerja layanan guru yang dinilai oleh KPL.

KPL dipilih oleh guru dan anggota masyarakat. Komite ini terdiri dari sembilan anggota, yakni enam perwakilan orang tua dan





Foto: Abdurrahman Doge/TNP2K

regulasi dan sumber-sumber daya finansial,” tambah Marliyanti.

### Respon Komunitas-Dampak Program Rintisan KIAT Guru

Masyarakat desa di Kabupaten Landak mengatakan rintisan itu membantu mereka menyadari rendahnya kualitas pendidikan di wilayah mereka.

“Saya tidak paham bagaimana murid-murid Kelas V dan VI masih seperti Kelas I. Mereka tidak tahu abjad, tidak bisa membaca. Saya bersyukur atas aktivitas-aktivitas KIAT Guru. Saya kira kita harus bekerja sekeras mungkin karena tidak ada yang bisa melakukannya kecuali kita,” ujar Johannes Amtas, ketua KPL di Desa Wana Bakti.

Martius, Kepala Desa Kumpang Tengah, mengatakan KIAT Guru membantu warga memahami bahwa dukungan masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. “Masyarakatlah yang memilih KPL, bukan sekolah. Warga memilih sendiri perwakilan mereka untuk menilai kinerja guru,” ujarnya.

Orang tua juga semakin sadar peran mereka dalam memperbaiki kualitas pendidikan anak mereka.

“Sebelumnya, orang tua di rumah tidak memberi perhatian pada bagaimana anak belajar di rumah. Orang tua tidak mau susah menyediakan perlengkapan belajar, seperti meja tulis atau kamar belajar.

Setelah KIAT Guru, semua orang tua sekarang memperhatikan proses belajar anak-anak mereka. Mereka menandatangani pekerjaan rumah yang dilakukan anak-anak mereka,” ujar Novi, anggota KPL di Desa Wana Bakti.

Sebuah penelitian dari UNICEF pada tahun 2012 menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan di wilayah-wilayah ini menyebabkan tingkat ketidakhadiran guru yang lebih tinggi. Studi mengenai ketidakhadiran guru oleh Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) pada tahun 2014 menemukan bahwa satu dari lima guru absen dari sekolah-sekolah di daerah terpencil, atau dua kali lipat tingkat nasional.

### INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini telah dimuat di:

<https://www.localsolutionstopoverty.org/id/project/kiat-guru-kinerja-dan-akuntabilitas-guru.html#tab-1>

# Riset: Hanya 11% Perempuan Jadi Narasumber Media di Indonesia

Oleh **Wulan Kusuma Wardhani**

**M**edia di Indonesia masih bias gender dalam peliputan dan pemberitaan, terlihat, antara lain dengan adanya ketimpangan dalam jumlah narasumber laki-laki dan perempuan, menurut sebuah diskusi yang diadakan Tempo Institute akhir pekan lalu.

Hasil penelitian yang dilakukan Tempo Institute serta Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT) menunjukkan bahwa dari 22.900 narasumber yang dikutip media, hanya 11 persen atau 2.525 orang di antaranya yang perempuan.

Penelitian tersebut didasarkan atas pengamatan terhadap berita-berita di luar rubrik hiburan pada 6 Agustus hingga 6 September 2018, di tujuh media cetak dan tiga media daring. Media-media tersebut adalah Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, Jawa Pos, Tempo.co, Kompas.com, dan Detik.com.

Salah satu penyebab ketimpangan jumlah narasumber laki-laki dan perempuan adalah kecenderungan media-media untuk mewawancarai narasumber yang paling mudah dihubungi, menurut para pembicara diskusi



Stereotip adalah ketika kita menggeneralisasi suatu kelompok dengan memberikan suatu karakter tanpa mengindahkan adanya keunikan tersendiri pada setiap orang yang menjadi anggota kelompok tersebut

“Perempuan dan Media” pada acara Tempo Media Week di Jakarta, pada pertengahan Desember 2018.

“Di newsroom, sering kali dipilih narasumber yang paling mudah diakses. Dia bisa ngomong politik, IT, dan ekonomi, karena mudah dihubungi dan mau menjawab pertanyaan apa pun dari jurnalis padahal sebenarnya dia bukan seorang *expert*,” ujar Ratna Ariyanti, wartawan Bisnis Indonesia sekaligus pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Menurut Ratna, media harus memberikan kesempatan kepada nama-nama narasumber baru, tetapi perlu proses untuk mendorong mereka muncul. “Kami sedang membuat *database* yang berisi kontak narasumber perempuan yang bisa diakses oleh anggota AJI,” tambahnya.

Pemimpin redaksi Kompas, Ninuk Mardiana Pambudy mengatakan, media biasanya mencari narasumber yang dapat menjelaskan sebuah isu dengan baik. “Berdasarkan pengalaman saya ketika melakukan liputan di DPR, dulu itu ada Ibu Aisyah Aminy. Semua orang mencari Bu Aisyah padahal banyak politisi laki-laki. Kenapa? Karena Bu Aisyah sangat paham persoalan, sikapnya jelas, dan tegas. Mungkin (anggota DPR perempuan yang lain) belum terlatih atau di ruang-ruang sidang, mereka tidak didorong untuk mengemukakan pendapatnya,” ujarnya.

### Seksisme dan Stereotip

Selain kurang menampilkan narasumber perempuan, media-media di Indonesia juga masih bernuansa seksis dan menonjolkan stereotip dalam pemberitaan tentang perempuan, menurut diskusi tersebut.

“Stereotip adalah ketika kita menggeneralisasi suatu kelompok dengan memberikan suatu karakter tanpa mengindahkan adanya keunikan tersendiri pada setiap orang yang menjadi anggota kelompok tersebut. Misalnya, ada artikel berjudul 'Ini Sebabnya Wanita Kurang Jago Berkendara Dibanding Pria'. Ini adalah stereotip yang sudah sangat usang,” ujar Devi Asmarani, Pemimpin Redaksi Magdalene.

Devi menambahkan, mayoritas media masih melakukan seksualisasi atau menjadikan perempuan sebagai objek seksual. Hal ini terlihat dalam judul-judul berita seperti “Pria Tertarik Pada Bokong Perempuan Seperti Ini”.

Selain itu, menurutnya, dalam meliput tokoh-tokoh perempuan, media cenderung berfokus pada ketubuhan perempuan, seperti terlihat dalam judul-judul 'Lima Bupati dan Walikota Tercantik di Indonesia' dan 'CEO Cantik Perusahaan Ini Senang Sekali ke Indonesia'. “Bahkan pemberitaan mengenai perempuan yang sudah meninggal pun tak jauh berbeda. Ada media yang menulis headline 'Mayat Wanita Berparas Cantik Ditemukan di Parit' dan 'Mayat Wanita Ditemukan Tak Mengenakan Celana Dalam',” ujar Devi.

Citra Dyah Prastuti, Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) mengatakan, rekan-rekannya sebetulnya telah memiliki kesadaran untuk menulis secara lebih sensitif gender. “Namun, reporter dan editor sering kali datang dan pergi sehingga kami perlu mendidik orang yang baru bergabung,” ujarnya.

Peran pemimpin media sangat penting dalam menyajikan pemberitaan yang ramah gender,

menurut Ninuk. Ia mencontohkan pengalamannya bertahun-tahun lalu saat diminta untuk membuat sisipan khusus “Swara” yang menyajikan isu-isu perempuan, di saat belum banyak orang memahaminya, termasuk rekannya sesama jurnalis perempuan.

“Satu hal yang paling penting adalah dukungan dari pimpinan. Walaupun Pak Jakob (Jakob Oetama, pendiri Grup Kompas) tidak mengatakan bahwa ia adalah seorang feminis, tetapi ia sangat paham tentang kesetaraan. Ia sangat sadar bahwa kesetaraan itu menjadi perspektif penting. Waktu itu kami belum menyebut-nyebut feminisme, kata 'gender' juga belum kami gunakan. Intinya kami harus pandai mencari cara dan strategi,” ujarnya.

Swara hanya bertahan selama satu tahun karena biaya produksi yang saat itu sangat tinggi akibat nilai tukar dolar yang meroket. Namun, menurut Ninuk, secara perlahan-lahan, isu gender masuk ke pemberitaan arus utama. Dalam pendidikan wartawan Kompas, salah satu hal yang diajarkan adalah mengenai peliputan berperspektif gender.

### Tantangan Spesifik Jurnalis Perempuan

Selain masalah pemberitaan bernuansa seksis dan minimnya narasumber perempuan, isu penting lainnya adalah menyangkut tantangan yang dihadapi jurnalis perempuan. Data AJI pada 2012 menunjukkan bahwa jumlah jurnalis laki-laki masih lebih banyak, dengan perbandingan sekitar 1:3.

Ninuk mengatakan bahwa masyarakat masih sangat patriarkal dan menuntut perempuan, termasuk jurnalis, untuk mendahulukan mengurus keluarga, rumah, anak, dan orang tua.

“Saya punya teman wartawan yang mengundurkan diri karena tuntutan suaminya. Suaminya marah setiap kali dia kerja sampai malam. Kalau sudah sampai seperti itu, perempuan biasanya enggak berdaya, dan

## Diskriminasi gender secara terang-terangan tidak ada, namun jurnalis perempuan terus menghadapi tantangan dalam peran gandanya sebagai pekerja perempuan, istri, ibu, dan anak perempuan

terpaksa memilih (untuk mengundurkan diri). Daripada rumah tangganya retak, dia keluar,” ujar Ninuk, yang merupakan pemimpin redaksi perempuan pertama sejak Kompas berdiri pada 1964.

“Tuntutan itu yang belum berubah dan seharusnya hal itu berubah,” ujarnya.

Evi Mariani, Redaktur Pelaksana The Jakarta Post, mengatakan bahwa diskriminasi gender secara terang-terangan tidak ada, namun jurnalis perempuan terus menghadapi tantangan dalam peran gandanya sebagai pekerja perempuan, istri, ibu, dan anak perempuan.

“Jurnalis perempuan di Jakarta Post yang memiliki anak sedang *struggling* untuk mendorong pendirian *daycare*. Mereka telah bertahun-tahun membicarakan hal ini dengan pimpinan. Ini adalah masalah yang sangat riil. Kami kehilangan banyak editor perempuan yang sangat kompeten (karena situasi ini),” ujarnya.

Evi menambahkan bahwa tempat penitipan anak dan ruang laktasi bukanlah *privilege*, melainkan hak yang bisa dituntut.

“Masyarakat masih membebani perempuan lebih besar. Jadi, ruang kerja harus paham bahwa ini bukan soal *privilege* tetapi, *in general*, perempuan masih *juggling* dengan keempat peran itu,” katanya.

### INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel bersumber dari Magdalene.co dan dapat dibaca pada link <https://magdalene.co/news-2012-riset-hanya-11-perempuan-jadi-narasumber-media-di-indonesia.html>

update

# batukar.info

## 2019, Dinas Pendidikan Papua fokus tingkatkan kualitas guru

Jayapura, Jubi - Pada 2019 ini, Dinas Pendidikan Provinsi Papua bakal lebih fokus meningkatkan kualitas guru. Mengedepankan program-program peningkatan akses dan layanan pendidikan di seluruh Bumi Cenderawasih.

"Peningkatan kualitas guru sangat penting, selama ini kita telah lakukan melalui pelatihan terhadap guru maupun kepala sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan Papua Elias Wonda kepada wartawan, di Jayapura, Jumat (11/1/2019).

Dengan adanya peningkatan kualitas guru, ujar ia, proses belajar mengajar di sekolah akan ikut meningkat. Untuk itu, program pelatihan terhadap guru tersebut secara terus menerus harus dilakukan.

"Secara umum hal ini telah memberikan manfaat, yang mana sebagian besar sekolah-sekolah di Papua sudah bisa melakukan ujian berbasis komputer seperti sekolah lain di Indonesia," ujarnya.



<https://batukarinfo.com/news/2019-dinas-pendidikan-papua-fokus-tingkatkan-kualitas-guru>

## Memaksimalkan peran pemerintah-masyarakat dalam penanggulangan narkoba

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan serius yang bersifat lintas negara dan terorganisasi dengan target semua lapisan masyarakat.

Konsepsi kejahatan narkoba bisa dilakukan siapa saja dan menyerang siapa saja, memang dapat dibuktikan dengan fakta yang nyata di tengah kehidupan masyarakat.

Meskipun target peredaran yang utama adalah generasi muda, tetapi saat ini semua lapisan masyarakat, tua-muda, kaya-miskin, pejabat bahkan aparat banyak yang terjerumus dalam narkoba-obatan terlarang itu.

Presiden Joko Widodo telah menyatakan tidak akan memberi ampun bagi siapa saja yang terlibat dalam peredaran narkoba di Indonesia. Bahkan kejahatan narkoba telah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa.



<https://batukarinfo.com/news/memaksimalkan-peran-pemerintah-masyarakat-dalam-penanggulangan-narkoba>

## Menristekdikti targetkan leader publikasi se-Asia Tenggara

Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan Indonesia tahun ini siap menjadi "leader" (pemimpin) publikasi internasional di kawasan Asia Tenggara.

Menristekdikti Mohamad Nasir di Makassar, Senin, mengatakan Indonesia saat ini sudah menempati posisi kedua di bawah Malaysia sebagai negara terbanyak melakukan publikasi internasional di Asia Tenggara.

"Pada akhir 2018, publikasi internasional Malaysia (posisi pertama) sebanyak 31 950 sementara kita sudah berada diangka 30.975 publikasi," katanya di Makassar.

"Dan 2019 ini, Indonesia akan menjadi leader publikasi internasional di Asia Tenggara," kata dia.

Ia menjelaskan, angka terbaru itu begitu tinggi jika dibandingkan dengan kondisi 20 tahun yang lalu yang masih jauh tertinggal dari Singapura dan Thailand.



<https://batukarinfo.com/news/memaksimalkan-peran-pemerintah-masyarakat-dalam-penanggulangan-narkoba>

## HUNTARA SETARA



**HUNTARA SETARA**  
Meningkatkan Kualitas dan Perhatian Masyarakat Terhadap Orang Disabilitas, Lansia, Anak dan Perempuan Melalui Pendekatan Berbasis Komunitas

Mengambil pembelajaran dari Pembangunan Huntara untuk Ibu Hamil, Menyusui, Lansia, Bencana Alam yang berlangsung di Pulau Lombok menumbuhkan keprihatinan banyak pihak. Berbagai langkah yang bersifat sementara untuk memulihkan kepercayaan warga yang terkena bencana telah dilakukan. Salah satunya adalah pendirian Huntara (Hunian Sementara) yang diintegrasikan dengan intervensi kesehatan dan

psikologis, dengan harapan bahwa penyintas yang rumahnya hancur dapat terlindungi dari penyakit yang muncul di lingkungan pengungsian, di samping persoalan sosialnya. Huntara juga diniatkan agar penyintas dapat segera bangkit dan melanjutkan hidup mereka, membangun kembali keluarganya.



<https://batukarinfo.com/referensi/huntara-setara-mengambil-pembelajaran-dari-pembangunan-huntara-untuk-ibu-hamil-menyusui>

## Kerelawanan Untuk Kesehatan Reproduksi Masa Paska Bencana



**KERELAWANAN UNTUK KESEHATAN REPRODUKSI MASA PASKA BENCANA**  
Meningkatkan Kualitas dan Perhatian Masyarakat Terhadap Orang Disabilitas, Lansia, Anak dan Perempuan Melalui Pendekatan Berbasis Komunitas

difokuskan pada upaya pencegahan kematian maternal dan neonatal serta pencegahan kekerasan berbasis gender, pencegahan penularan HIV serta upaya memastikan akses pada alat kontrasepsi dapat tersedia secara berkualitas dan terjangkau.



<https://batukarinfo.com/referensi/kerelawanan-untuk-kesehatan-reproduksi-masa-paska-bencana>



## Kegiatan di BaKTI

14 Februari 2019

### Audit BKM tahun Buku 2018 Kota Makassar

Awal tahun merupakan momentum rutin menguji akuntabilitas pengelolaan keuangan di 143 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang tersebar di setiap kelurahan di Kota Makassar. Uji akuntabilitas dilakukan melalui audit independen oleh Konsultan Akuntan Publik (KAP) yang terpercaya dan berpengalaman. BKM merupakan kelembagaan masyarakat yang dibentuk sejak tahun 2005 melalui inisiasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP). Program tersebut bertransformasi menjadi Program Nasional Pembardayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Tahun 2007 dan di



Tahun 2015 menjadi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Audit independen ini salah satunya yang dilaksanakan oleh BKM Kunjung Mae Kota Makassar untuk tahun buku 2018, bertempat di kantor BaKTI Makassar. Pelaksanaan audit dilakukan secara kluster berdasarkan kedekatan geografis beberapa BKM. Auditor yang ditunjuk sebagai pelaksana audit ini adalah KAP Yaniswar dan rekan.

22 Februari 2019

### Australia Awards Sharing Session

Australia Indonesia Youth Association Eastern Indonesia Chapter (AIYA Eastern Indonesia Chapter) bekerja sama dengan BaKTI mengadakan "Australia Awards Scholarships Sharing Session" dengan narasumber M. Sofyan, seorang Alumnus AAS, Master of Research Education by Research di Victoria University, dan Rio Afifuddin, Alumnus AAS, Master of International Development Practice, Monash University. *Sharing Session* khusus Australia Awards Scholarship seperti ini telah menjadi agenda tahunan. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan sebelum pendaftaran beasiswa tersebut dibuka atau bahkan pada saat pendaftaran administrasi sedang berlangsung. *Sharing Session* yang berlangsung di kantor BaKTI ini, dihadiri oleh 47 peserta dan 2 alumni penerima Australia Awards Scholarship diminta untuk berbagi pengalaman yang didapat. Para alumni tersebut menceritakan seputar proses penerimaan beasiswa ini, mulai dari awal tahap aplikasi *online* hingga tahapan akhir yakni



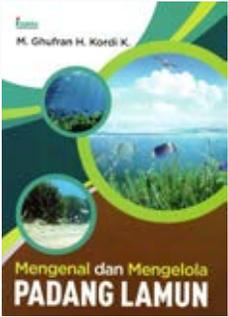
wawancara. Tidak hanya itu, mereka juga memberikan saran secara umum bagaimana bentuk ideal dari sebuah aplikasi beasiswa. Antusias peserta yang tinggi terlihat pada sesi tanya jawab dimana banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyita waktu cukup lama. AIYA selaku pelaksana berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan calon pendaftar dalam membuat aplikasi beasiswa yang baik dan benar dan pastinya sesuai dengan ekspektasi pemerintah Australia sebagai penyedia beasiswa.

27 Februari 2019

### Joint Partnership Review

Yayasan BaKTI dan UNICEF mengadakan pertemuan *Joint Partnership Review* yang melibatkan pemangku kepentingan program *Child Protection* (CP) di Kota Makassar dan kabupaten Gowa, bertempat di kantor BaKTI Makassar. *Joint Partnership Review* kali ini menghadirkan 16 peserta dari unsur penerima manfaat dan *focal point* OPD

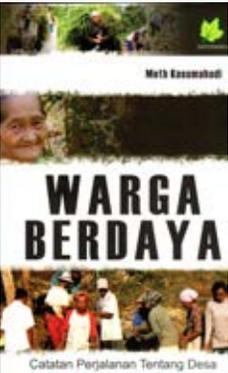
mitra kunci dari pemerintah Kota Makassar dan Gowa yang terdiri dari Bappeda, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, dan BAPAS Makassar. Hadir pula Deputi Direktur BaKTI, Zusanna Gosal dan tim program BaKTI-UNICEF. Dalam pertemuan ini Tim UNICEF melakukan penggalian informasi berkenaan dengan capaian dan hasil dampak program *Child Protection* dengan fokus pada dua area utama program CP yaitu Pencatatan Kelahiran (*Birth Registration*) dan PKSAI (Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif).



## Mengenal dan Mengelola Padang Lamun

**PENULIS** M. Ghufan H. Kordi K

Padang lamun (*seagrass beds*) adalah salah satu dari tiga ekosistem di daerah pesisir dan pulau-pulau. Ekosistem padang lamun merupakan penyangga bagi kehidupan laut dan darat, karena berada di daerah peralihan laut dan darat. Sebagai ekosistem pesisir, keberadaannya sangat penting, namun ekosistem ini juga sering diganggu sehingga mengalami kerusakan. Penulisan buku ini merupakan upaya penyebaran informasi mengenai potensi dan fungsi ekosistem padang lamun, demi mencegah terjadinya kerusakan.



## Warga Berdaya

**PENULIS** Meth Kusumahadi

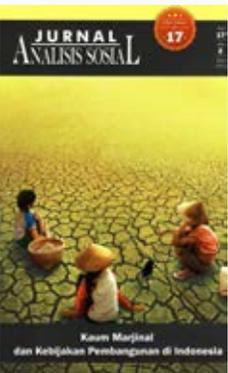
Desa dan warga desa adalah inspirasi yang tiada pernah habis bagi mereka yang mengambil pilihan sebagai pekerja sosial. Buku ini merekam perjalanan pemikiran tentang dinamika desa dan warga desa di berbagai penjuru negeri ini. Rekaman berupa tulisan ini menampilkan beragam wajah desa yang terkalahkan, terpinggirkan, terancam, yang bergulat dengan kesulitan, yang berhasil dalam mempertahankan hidup, yang rusak oleh teror dan kekerasan dengan segala harapan untuk lestari.



## Jurnal Perempuan Edisi 99: Perempuan dan Ekonomi Perawatan

**PENERBIT** Jurnal Perempuan

Dalam beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan tingginya permintaan terhadap tenaga kerja di sektor perawatan yang lebih banyak dilakoni oleh perempuan. Namun rupanya ada berbagai masalah yang membelit para pekerja di sektor perawatan, seperti upah rendah, rasa tak aman serta eksploitasi. Dalam edisi kali ini Jurnal Perempuan mengangkat tema Perempuan dan Ekonomi Perawatan untuk melihat kompleksitas perempuan dalam mencari nafkah.



## Kaum Marjinal dan Kebijakan Pembangunan di Indonesia

**PENERBIT** AKATIGA

Buku ini merupakan kumpulan tulisan ilmiah yang membahas persoalan yang menyangkut kaum miskin yang berkaitan dengan kebijakan di Indonesia. Persoalan kemiskinan masih menjadi wajah utama pembangunan di negara kita. Indikator masalah kemiskinan yang masih tinggi diantaranya adalah diciptakannya berbagai program pengurangan kemiskinan dan dibentuknya tim khusus untuk mempercepat berkurangnya kemiskinan di Indonesia.

Terimakasih atas donasi buku dari bapak M. Ghufan H. Kordi K dan Akatiga.

Buku-buku tersebut diatas dapat dibaca di Perpustakaan BaKTI.

Jika anda memiliki buku atau publikasi lainnya yang ingin dipublikasikan sila hubungi kami di BaKTI.